



BNPB

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TRIWULAN IV**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB), BNPB, maka disusun Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 ini. Dalam Laporan ini disampaikan informasi tentang gambaran progres, realisasi dan capaian dari pelaksanaan kegiatan/program Pusdiklat PB BNPB dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusdiklat PB memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana di antaranya melalui kegiatan pelatihan, simulasi, dan pengelolaan pengetahuan. Selain itu, dilakukan pula akreditasi terhadap lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana dan sertifikasi kompetensi terhadap sumber daya manusia pelaku penanggulangan bencana. Melalui Laporan Evaluasi Triwulan IV Ini diharapkan dapat diketahui berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Pusdiklat PB, kemudian melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan output yang diharapkan.

Penyusunan Laporan Triwulan IV TA. 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan yang membangun terhadap laporan ini. Selain itu, besar harapan kami atas saran dan kritik demi meningkatkan kinerja Unit Pusdiklat PB BNPB di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB dalam menata sistem kerja pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) maka seluruh kinerja yang telah dilakukan dilaporkan dalam bentuk Laporan Triwulan. Pelaporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dimaksudkan sebagai media informasi terkaitcapaian kinerja Pusat Pendidikan Pelatihan PB pada Triwulan IV tahun anggaran 2021.

Laporan Triwulan IV Pusdiklat Penanggulangan Bencana merupakan salah satu wujud akuntabilitas secara periodik bulan Januari s.d. Desember 2021. Sesuai Renstra BNPB 2020-2024 Pusdiklat PB BNPB memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Pusdiklat PB memiliki tanggungjawab dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat PB memberikan pelayanan yang tertuang ke dalam output program kegiatan yang terdiri dari Diklat Teknis PB dan Simulasi PB di Daerah sebagai kegiatan Prioritas Nasional; Diklat Teknis PB di Pusat dan Gladi PB Internasional sebagai Kegiatan Utama; dan Layanan Diklat sebagai Kegiatan Pendukung.

Sampai dengan Triwulan IV dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB sudah tercapai 79 %, sudah tercapainya 3 Akreditasi Lembaga Diklat, terlaksananya Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi Bidang PB Bagi ASN sebanyak 30 Orang Asesor, tercapainya Koordinasi sebanyak 5 Kegiatan, terbentuknya Norma, Standars, Prosedur dan Kriteria bidang diklat sebanyak 5 Dokumen, Tercapainya pelatihan Teknis PB di Pusat bagi ASN sebanyak 527 orang, tercapainya layanan umum Operasional Pusdiklat PB sebanyak 1 Layanan, tercapainya Pendidikan dan pelatihan non teknis sebanyak 412 orang, dan tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah sebanyak 897 orang.

Penyelenggaraan Diklat Dasar Manajemen Bencana yang dilaksanakan secara mandiri oleh Kodiklat TNI, BPBD Provinsi, BPSDM Provinsi, adalah sebanyak 290 orang yaitu Provinsi Provinsi SIGI, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera barat, Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi akuntabilitas kinerja anggaran sampai dengan revisi anggaran terakhir, Pusdiklat PB memiliki alokasi anggaran Rp 21.443.832.000,-. Sampai dengan Triwulan IV didapatkan realisasi anggaran sebanyak 79 % (Rp 16.899.002.193,-), sedangkan untuk masing-masing per output dihasilkan bahwa untuk Akreditasi Lembaga sebesar 98,34%, Menyelenggarakan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi sebesar 64,25%, Perencanaan, Koordinasi, Dan Monev Diklat Pb sebesar 98,53%, Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pb DiPusat Dan Gladi Pb sebesar 30% , Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 27,59%, Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB di Pusat dan Gladi PB sebesar 86%, Layanan Umum Diklat Pb sebesar 90,30%, Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis sebesar 99,36%, dan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pb Dan Simulasi Pb Di Daerah sebesar 99,75%. Pada Pelatihan Bidang Penanganan Bencana dari bulan Januari – Desember sudah ada alumni diklat yang sudah dilatih di Pusdiklat PB sebanyak 1.424 orang. Pada Layanan Umum diklat sedang proses pembentukan Peraturan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Lokakarya dalam hal ini sudah terlaksana penyerapan anggaran sebesar 29,91%. Pada Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal dari Januari – Desember sudah tercapai melebihi output sebanyak 412 orang. Pada Pendidikan dan pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di Daerah Pencapaian outputnya sudah melebihi output sebanyak 897 Orang, Untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB di Pusat bagi ASN sudah tercapai 527 orang alumni.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB dalam menata sistem kerja pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) maka seluruh kinerja yang telah dilakukan dilaporkan dalam bentuk Laporan Triwulan. Pelaporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dimaksudkan sebagai media informasi terkait capaian kinerja Pusdiklat PB Penanggulangan Bencana pada Triwulan IV tahun anggaran 2021.

Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel. Untuk itu, Pusat Pendidikan dan pelatihan PB Penanggulangan Bencana secara periodik diharuskan menyampaikan *progress* atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dalam bentuk laporan triwulan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana membuat Perjanjian Kinerja sebagai dasar acuan kinerja di Pusdiklat PB, Adapun perjanjian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam gambar berikut:

Pada tahun anggaran 2021, Kepala Pusdiklat PB memiliki Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**Formulir Perjanjian Kinerja
Tingkat Unit Eselon I, dan II**

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran : 2021

No 1	Sasaran Kinerja 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
01	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Jumlah Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan Teknis PB yang telah diakreditasi	3 Lembaga
		Jumlah SDM yang disertifikasi	60 Orang
		Jumlah kegiatan koordinasi Pendidikan dan Pelatihan PB	5 Kegiatan
		Jumlah dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 Dokumen
		Jumlah SDM dilatih pada Bidang Penanganan Bencana	512 Orang
		Jumlah kegiatan layanan umum di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB	2 Layanan
		Jumlah SDM Pendidikan dan pelatihan Layanan Non teknis Internal	180 Orang
		Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 Orang

Gambar 1. Formulir Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat PB Tahun 2021

Seperti terlihat pada gambar 1, Kepala Pusdiklat PB bertanggungjawab untuk mengelola anggaran sebesar Rp 21.443.832.000,- untuk mencapai 8 output kegiatan. Anggaran Pusdiklat PB tersebut berasal dari DIPA BNPB sebesar Rp17.443.832.000,- dan pinjaman dari Bank Dunia melalui Program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) sebesar Rp4.000.000.000,-

Capaian kinerja dan realisasi anggaran Pusdiklat PB pada Triwulan IV tahun 2021 (periode Januari s/d Desember 2021) dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pusdiklat PB Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

No.	Unit/Program/Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	%
1.	Akreditasi Lembaga	3 Lembaga Diklat	719.760.000	5 Lembaga Diklat	707.781.140	98,34%
2.	Sertifikasi profesi dan SDM	60 Orang	405.700.000	30 Orang	260.645.000	64,25%
3.	Perencanaan, Koordinasi dan Money Diklat PB	5 Kegiatan	1.942.655.000	5 Kegiatan	1.914.179.467	98,53%
4.	Norma Standard Prosedure dan Kriteria	9 Dokumen	4.159.875.000	5 NSPK	1.147.675.200	27,59%
5.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	512 Orang	2.386.755.000	527 Orang	1.187.618.000	86%
6.	Layanan Umum	2 Layanan	1.181.206.000	1 Layanan	1.066.605.100	90,30%
7.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	180 Orang	1.756.061.000	412 orang	1.744.793.260	99,36%
8.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (PN)	760 Orang	8.891.820.000	964 orang	8.869.705.026	99,75%
Total			21.443.832.000		16.899.002.193	79%

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Triwulan IV tahun 2021, Pusdiklat PB memenuhi target capaian output, yaitu Untuk Prioritas Nasional Pelatihan Bidang Penanganan Bencana yaitu 1.250 orang, telah menerima berbagai pelatihan dari Pusdiklat PB. Sementara itu, Sebagian kegiatan pendukung dan layanan masih terus dalam proses.

Dari sisi anggaran, dari Tabel 1, kita bisa melihat bahwa dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021, Pusdiklat PB telah menyerap anggaran sebesar 79% atau sebesar Rp 16.899.002.193,- dari total pagu anggaran sebesar Rp21.443.832.000,-.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Gambar.....	9
Daftar Tabel.....	11
BAB I. PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
A. Maksud dan Tujuan.....	12
B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....	13
C. Tugas dan Fungsi Pusdiklat Penanggulangan Bencana	13
D. Sumber Daya Manusia Pusdiklat PB	15
1.2. Isu Strategis.....	17
1.3. Sistematika Penyajian Laporan.....	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1. Sasaran Program.....	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
2.3. Rencana Aksi.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.1.1. Akreditasi Lembaga	24
3.1.2. Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana	25
3.1.3. Perencanaan, Koordinasi dan Monev Diklat PB.....	27
3.1.4. Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria	37
3.1.5. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (PN).....	40
3.1.6. Layanan Umum Pusdiklat PB	42
3.1.7. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	44
3.1.8. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	45
3.1.9. Kegiatan Pendukung	49
3.2. Analisis Kegiatan (Keberhasilan dan Tantangan)	51
3.3. Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV. PENUTUP	57
lampiran	a
1. Perjanjian Kinerja.....	a
2. Rencana Aksi.....	b

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Formulir Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat PB Tahun 2021	5
Gambar 2. Fungsi Pusdiklat PB (Perban 4/2019)	14
Gambar 3. Struktur Organisasi Pusdiklat PB	14
Gambar 4. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan	15
Gambar 5. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan	16
Gambar 6. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan	16
Gambar 7. Isu Strategis BNPB, K/L, dan Pemangku Kepentingan Lain.....	17
Gambar 8. Isu Strategis Pusdiklat PB.....	18
Gambar 9. Kegiatan untuk Program Akreditasi Lembaga hingga Desember 2021	24
Gambar 10. Beberapa Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan Pusdiklat PB di Triwulan III tahun 2021.....	29
Gambar 11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Pusdiklat PB tahun 2021	30
Gambar 12. Rapat Triwulan IV Diselenggarakan Secara Offline dengan Metode Talkshow dari Narasumber.....	31
Gambar 13. Rapat Persiapan Evaluasi Pascadiklat Alumni bersama Akademisi.....	32
Gambar 14. Proses Evaluasi Pascadiklat terhadap Alumni dari BPSDM Provinsi Bali.Error! Bookmark not defined.	
Gambar 15. Proses Evaluasi Pascadiklat di Provinsi Sumatera Utara	33
Gambar 16. Pembukaan Rapat Review Standar Pelayanan Publik di Pusdiklat PB.....	34
Gambar 17. Kegiatan yang Mendukung Upaya Mengelola Pengetahuan di Pusdiklat PB	35
Gambar 18. Perekaman Pengetahuan, Widyaiswara Pusdiklat PB Mewawancarai Personil BPBD Provinsi Jawa Timur.....	36
Gambar 19. Flyer Kegiatan Webinar 'Dari Sentul Kita Sharing Jilid 2'	37
Gambar 20. Kegiatan NSPK di Pusdiklat PB pada Tahun 2021	38
Gambar 21. Proses Penyusunan Pedoman Sertifikasi PB di Jakarta	39
Gambar 22. Peserta dan Jenis Pelatihan Teknis Bidang PB di Triwulan IV, Tahun 2021	40
Gambar 23. Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana	41
Gambar 24. Salah Satu Sesi Diskusi di Pelatihan Risiko Bencana di Medan Sumatera Utara	42
Gambar 25. Kegiatan di Program Layanan Umum Pusdiklat PB	43
Gambar 26. Contoh Souvenir dari Pusdiklat PB untuk Tamu dan Peserta Edukasi Kebencanaan	43
Gambar 27. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal di Pusdiklat PB pada Triwulan III tahun 2021.....	44
Gambar 28. Jumlah Peserta yang Telah Mengikuti Pelatihan Internal.....	45

Gambar 29. Sosialisasi Latsar CPNS BNPB Tahun 2021.....	45
Gambar 30. Persebaran 13 Lokasi Diklat Teknis PB dan Diklat Lainnya	46
Gambar 31. Sebaran Provinsi Penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Bencana	47
Gambar 32. Tahapan dalam Menyelenggarakan Simulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota.....	48
Gambar 33. Lokasi yang Telah Menyelenggarakan Kegiatan Perancang Simulasi	48
Gambar 34. Kegiatan Perancang Simulasi di Papua	49
Gambar 35. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di SDN 04 Hambalang	50
Gambar 36. Jumlah Peserta dari Pelatihan Mandiri oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Usaha	51
Gambar 37. Capaian Kegiatan Pelatihan Internal di BNPB	52
Gambar 38. Capaian Kegiatan Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana di Pusat:	52
Gambar 39. Capaian Program Pelatihan Bidang Penanganan Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	53
Gambar 40. Perbandingan Sumber Dana dari APBN dan IDRIP.....	54
Gambar 41. Penyerapan Anggaran di Pusdiklat PB pada Triwulan IVPertama Tahun 2021	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pusdiklat PB Triwulan IV Tahun Anggaran 2021	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat PB, tahun 2021	20
Tabel 3. Capaian Kinerja Pusdiklat PB di Triwulan IV Tahun 2021.....	23
Tabel 4. Informasi Detail Pelatihan Teknis Bidang PB.....	41
Tabel 5. Nama Provinsi dan Jenis Diklat yang Diselenggarakan Pusdiklat PB Tahun 2021	46
Tabel 6. Pelatihan Mandiri yang Diselenggarakan oleh Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Usaha	50
Tabel 7. Detail Penyerapan Kegiatan dan Persentasenya di Tiap Kegiatan	55

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4, Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPB, Pusdiklat PB mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Selanjutnya sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi keenam Pusdiklat PB, yaitu persiapan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan, maka Pusdiklat PB perlu menyusun Laporan Triwulan IV 2021 ini.

Laporan ini nantinya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Pusdiklat PB kepada lembaga BNPB, para pimpinan, dan masyarakat. Selain itu, laporan ini bermanfaat untuk pemantauan kinerja secara periodik dengan melihat dari realisasi anggaran dan capaian kinerja, terutama pada kurun waktu dua belas bulan, dari Januari hingga Desember 2021. Dengan demikian, maka laporan kinerja Triwulan IV tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPB, khususnya di lingkungan Pusdiklat PB.

A. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Triwulan IV tahun 2021 ini dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi dan menganalisis progress, tahapan, dan capaian kinerja Pusdiklat PB, BNPB pada Triwulan IV tahun 2021 (Januari - Desember 2021).

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dalam progress pengerjaan di Pusdiklat PB. Selanjutnya, laporan ini juga berperan sebagai dasar dan membantu melakukan perbaikan berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran di Pusdiklat PB.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

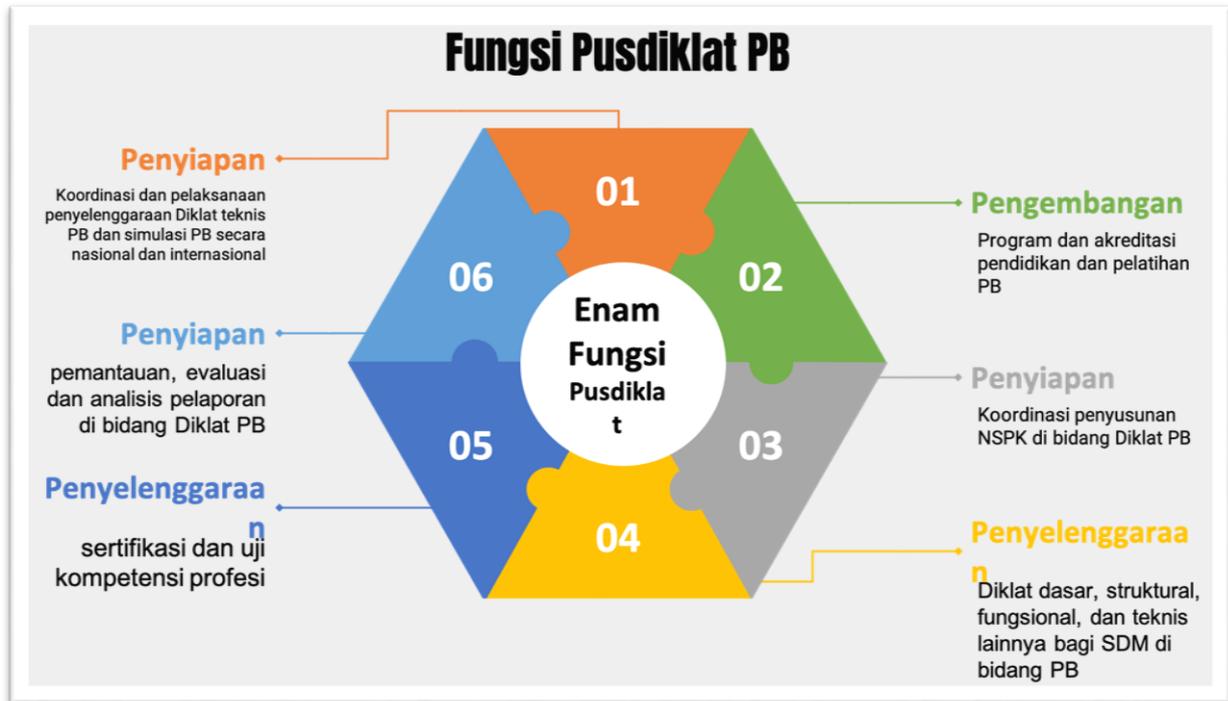
Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV tahun anggaran 2021 ini berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- d. Perpres No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2021.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
- f. Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- g. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BNPB
- h. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB.
- i. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- j. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2024.
- k. DIPA BNPB TA 2021

C. Tugas dan Fungsi Pusdiklat Penanggulangan Bencana

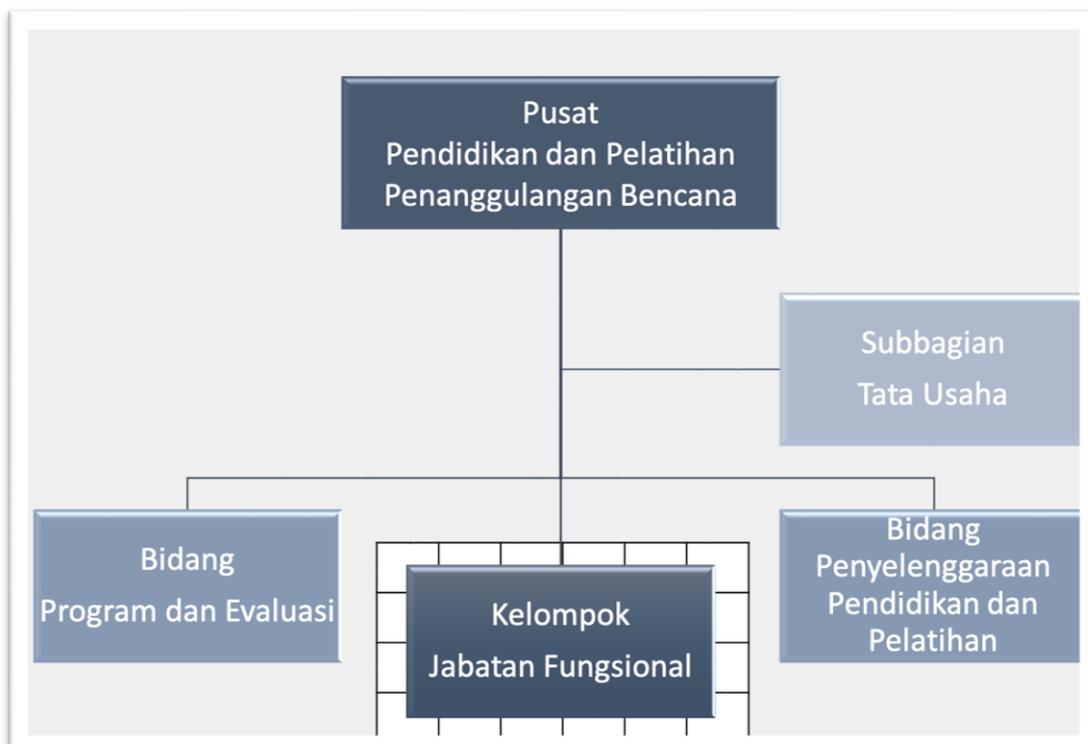
Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4, Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPB, Pusdiklat PB mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Sejalan dengan tugas tersebut, Pusdiklat PB menyelenggarakan fungsi:



Gambar 2. Fungsi Pusdiklat PB (Perban 4/2019)

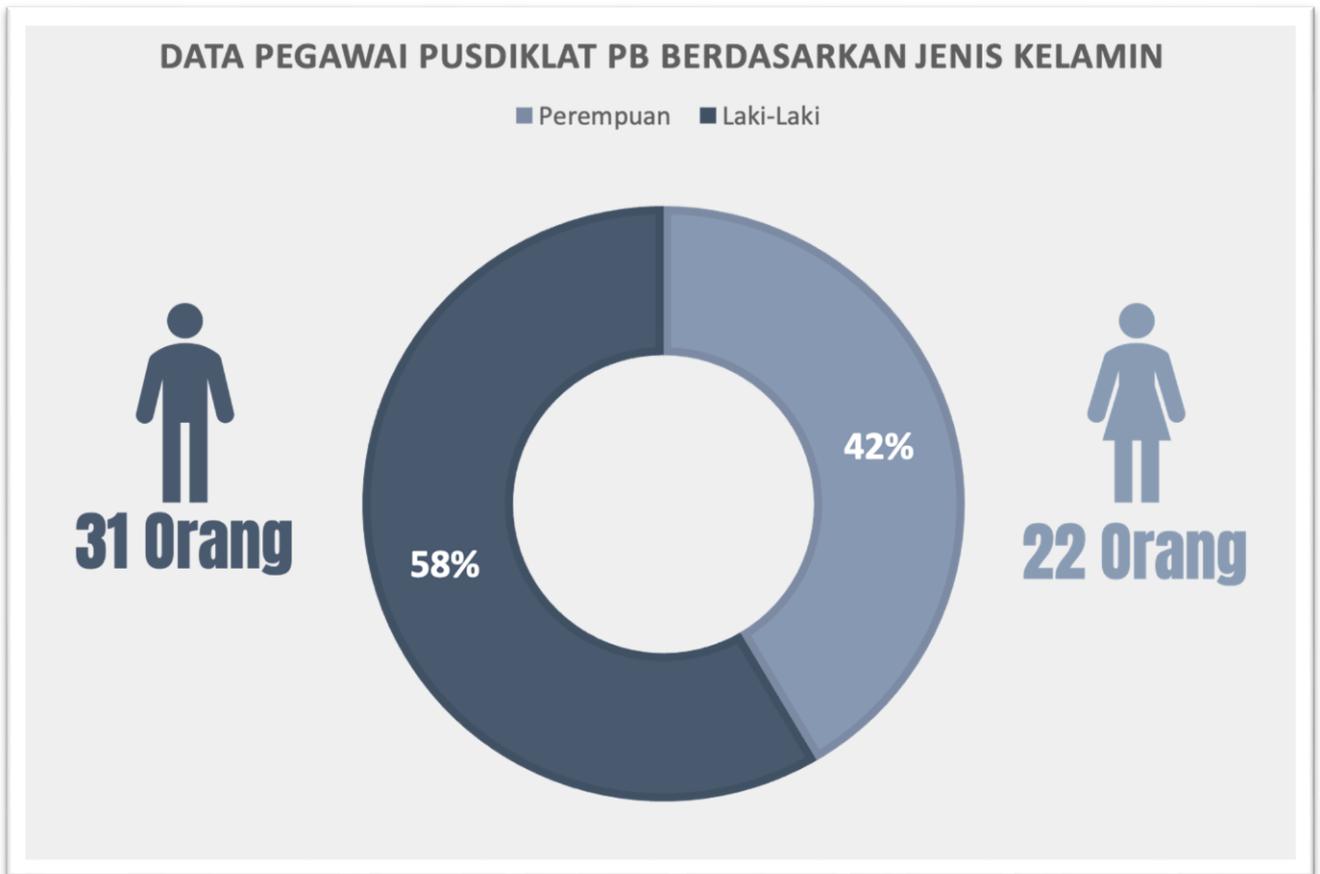
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka struktur organisasi Pusdiklat PB berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:



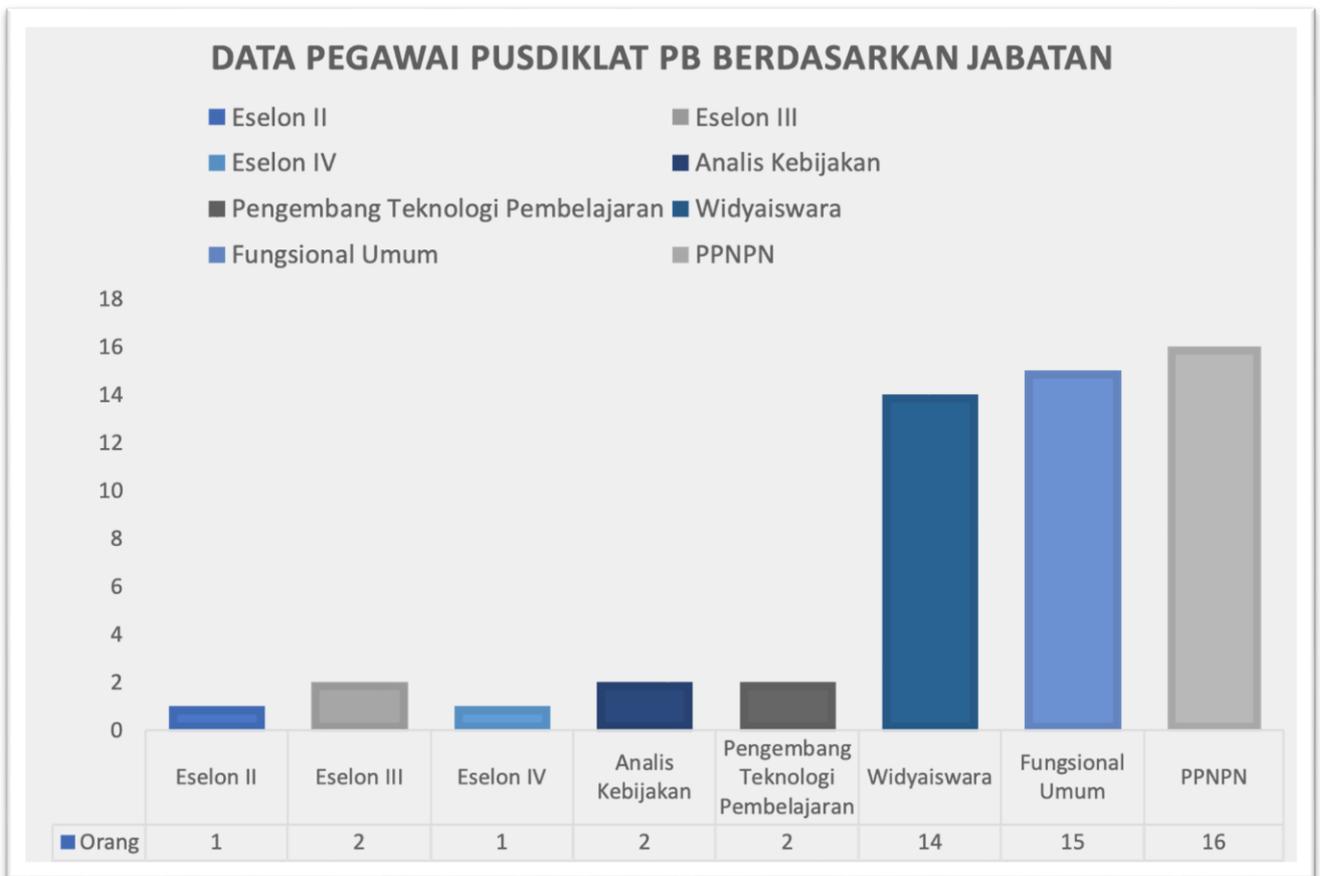
Gambar 3. Struktur Organisasi Pusdiklat PB

D. Sumber Daya Manusia Pusdiklat PB

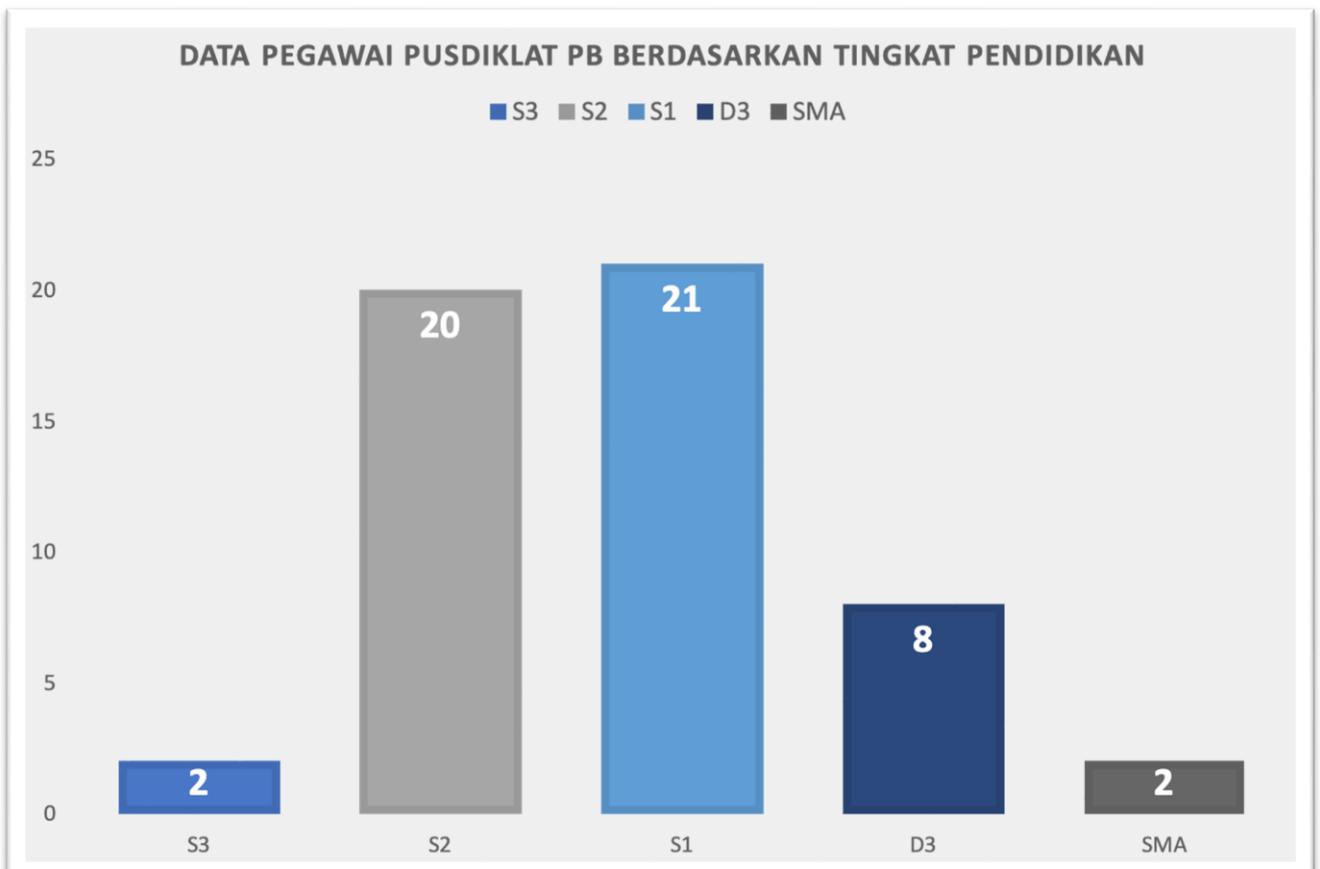
Pegawai di Pusdiklat PB saat ini berjumlah 53 orang yang terdiri dari 37 orang ASN dan 16 orang PPNPN, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan



Gambar 5. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan



Gambar 6. Komposisi Pegawai Pusdiklat PB berdasarkan Jabatan

1.2. Isu Strategis

Isu strategis meliputi isu-isu strategis nasional dan global yang membutuhkan sinergi antara BNPB, K/L, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta isu-isu strategis internal BNPB yang juga membutuhkan perhatian dari Pusdiklat PB. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BNPB 2020-2024, terdapat dua macam isu strategis, yaitu yang berkaitan dengan BNPB dan K/L serta pemangku kepentingan, serta isu strategis yang khusus terkait dengan Pusdiklat PB.

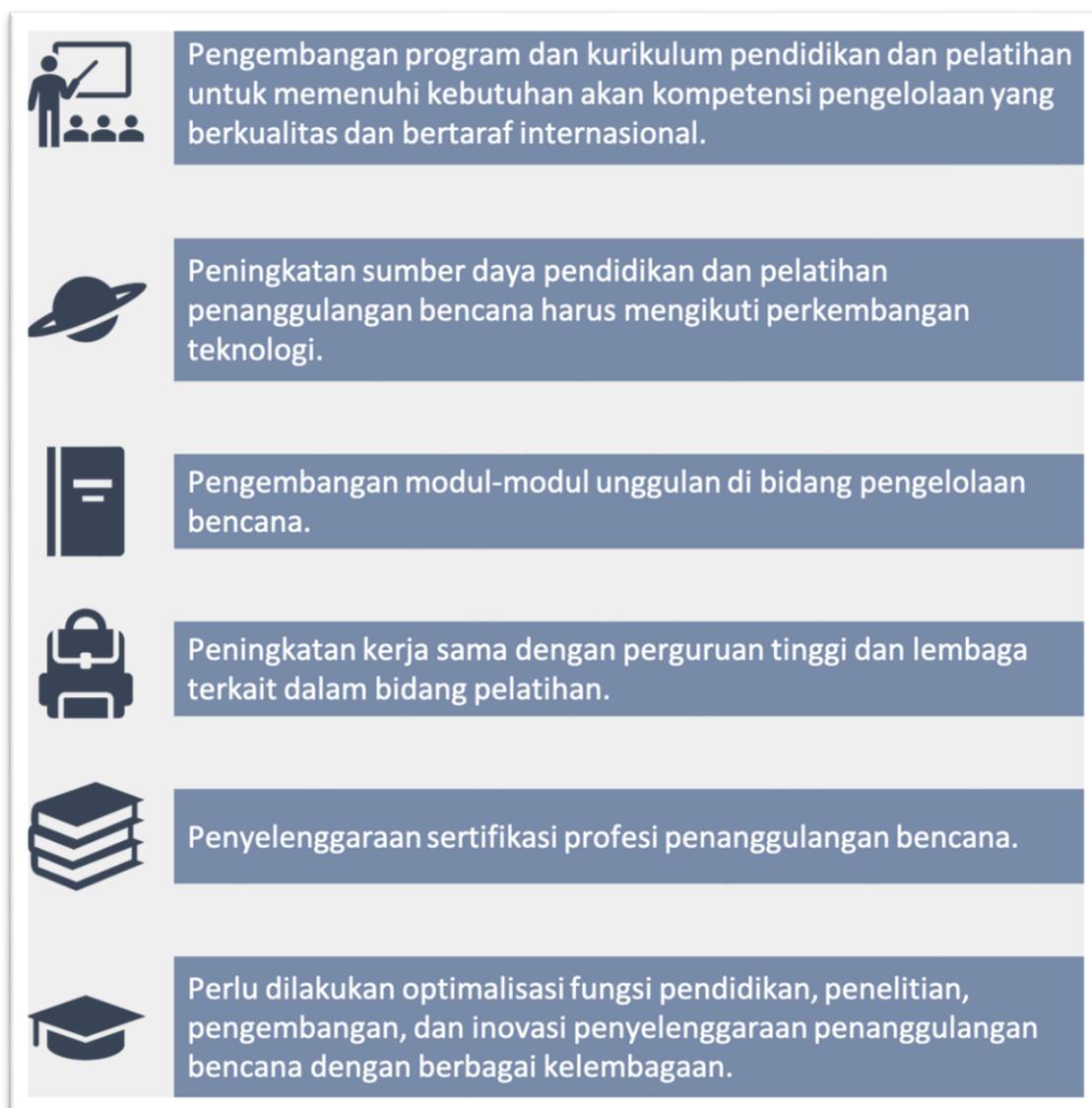
Isu Strategis BNPB, K/L, dan Pemangku Kepentingan di antaranya:

	<p>Isu 1: Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam dan nonalam.</p> <p>Baik ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi menjadi ancaman yang serius. Selain dua jenis bencana tersebut, masih terdapat ancaman bencana nonalam, seperti pandemi Covid-19.</p>
	<p>Isu 2: Karakteristik Indonesia yang Berisiko Bencana Tinggi.</p> <p>Selain Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, masih ada ancaman dari pengaruh perubahan iklim. Dua kondisi ini akan menyebabkan korban, kerugian, kehilangan, dan kerusakan yang lebih besar di masa depan jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.</p>
	<p>Isu 3: Agenda Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan.</p> <p>Indonesia berkomitmen untuk melakukan dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana (SFDRR) serta mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kedua agenda dunia tersebut bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana.</p>
	<p>Isu 4: Mengedepankan upaya pencegahan bencana.</p> <p>Penelitian dari PBB menunjukkan bahwa upaya pencegahan dapat menghemat anggaran jika dibandingkan dengan melakukan operasi tanggap darurat. Karena itu, maka upaya pencegahan perlu dikedepankan pada saat melakukan upaya penanggulangan bencana.</p>
	<p>Isu 5: Optimalisasi Pendekatan Pentaheliks.</p> <p>Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama dari unsur pentaheliks, yaitu pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media.</p>

Gambar 7. Isu Strategis BNPB, K/L, dan Pemangku Kepentingan Lain

Isu strategis berikutnya adalah berkaitan dan khusus dengan Pusdiklat PB. Sesuai dengan Renstra BNPB tahun 2020-2024, disampaikan bahwa pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. Kemudian perlu dilakukan optimalisasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, serta menyebarkan informasi dan pengetahuan, maka Pusdiklat PB perlu menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut:



Gambar 8. Isu Strategis Pusdiklat PB

1.3. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Pusdiklat PB untuk Triwulan IV dan Triwulan IV Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penyajian;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis BNPB selama tahun 2015-2021, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja tahun 2021;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BNPB selama Triwulan IV tahun 2021 dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BNPB selama Triwulan IV tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Sasaran Program

Berbagai program dan kegiatan Pusdiklat PB diarahkan untuk mewujudkan tugas dan fungsi Pusdiklat PB, sesuai yang tertera dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan peraturan perubahannya (Nomor 8 Tahun 2020), serta Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2024 (Lihat penjelasan Tugas dan Fungsi Pusdiklat PB di Bab I, Poin C).

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pusdiklat PB memiliki perjanjian kinerja. Dokumen ini mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai acuan pencapaian organisasi dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja yang dimandatkan kepada Pusdiklat PB di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat PB, tahun 2021

No.	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rupiah)	Target
1	Meningkatnya kualitas Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional akuntabel dan transparan	Akreditasi Lembaga	719.760.000	3 Lembaga Diklat
		Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana	405.700.000	60 Orang
		Perencanaan, Koordinasi dan Monev Diklat PB	1.942.655.000	5 Kegiatan
		Norma Standard Prosedure dan Kriteria	4.159.875.000	9 Dokumen
		Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (PN)	2.386.755.000	512 Orang
		Layanan Umum	1.181.206.000	2 Layanan
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1.756.061.000	180 Orang
		Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	8.891.820.000	760 Orang

2.3. Rencana Aksi

Dalam meraih sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Pusdiklat PB juga menyusun rencana aksi. Di dalamnya disampaikan:

- Sasaran Kinerja/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
- Indikator Kinerja
- Target Kinerja
- Target tiap bulan
- Unit penanggung jawab

Secara lengkap, Rencana Aksi Pusdiklat PB dapat dibaca di Lampiran 2.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja menunjukkan perbandingan antara target yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat PB Tahun Anggaran 2021 (Gambar 1) dengan hasil capaian kinerja Triwulan IV, yaitu periode Januari hingga Desember tahun 2021. Dari perjanjian kinerja, Pusdiklat PB memiliki target yang bervariasi sesuai dengan kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Sampai dengan bulan Desember atau Triwulan IV tahun 2021, seluruh program dan kegiatan di Pusdiklat PB masih dalam proses, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pusdiklat PB Tahun Anggaran 2021

No	Unit/Program/ Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	%
1	Akreditasi Lembaga	3 Lembaga	719.760.000	5	707.781.140	98,34 %
2	Sertifikasi Profesi dan SDM	60 orang	405.700.000	30	260.645.000	64,25%
3	Koordinasi	5 Kegiatan	1.942.655.000	5	1.914.179.467	98,53%
4	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 NSPK	4.159.875.000	5	1.147.675.200	27,59%
5	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	512 orang	2.386.755.000	527	1.187.618.000	86 %

6	Layanan Umum	2 layanan	1.181.206.000	1	1.066.605.100	90,30%
7	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	180 orang	1.756.061.000	412	1.744.793.260	99,36%
8	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 orang	8.891.820.000	897	8.869.705.026	99,75%

Dari Tabel 1, kita bisa melihat bahwa dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021, Pusdiklat PB telah menyerap anggaran sebesar 79 % atau sebesar Rp 16.899.002.193 dari total pagu anggaran sebesar Rp 21.443.832.000

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pusdiklat PB di Triwulan IV Tahun 2021

No.	Unit/Program/Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Akreditasi Lembaga	3 Lembaga	Tercapai 5 Lembaga
2.	Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana	60 Orang	30 Orang Tersertifikasi
3.	Perencanaan, Koordinasi dan Monev Diklat PB	5 Kegiatan	Tercapai 5 Kegiatan
4.	Norma Standard, Prosedur, dan Kriteria	9 Dokumen	5 NSPK
5.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (PN)	512 Orang	Tercapai 527 Orang
6.	Layanan Umum	2 Layanan	1 Layanan
7.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	180 Orang	Tercapai 412 orang
8.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 Orang	Tercapai 897 orang

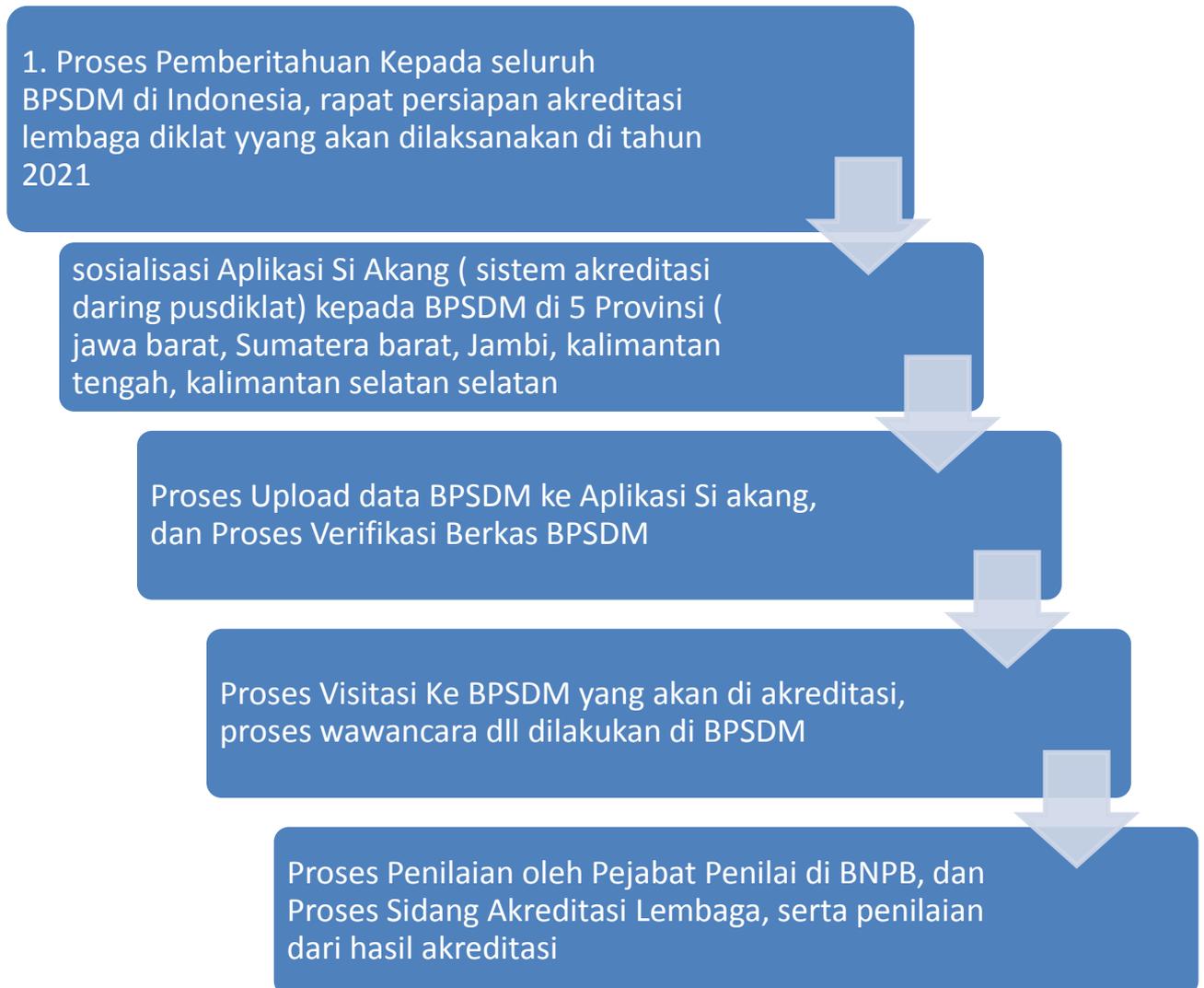
Penyelenggaraan program dan kegiatan di Pusdiklat PB mengalami dinamika dan terpengaruh oleh berbagai fenomena dan kebijakan di dalam dan luar lembaga Pusdiklat sendiri. Oleh sebab itu, terdapat variasi pada capaian output kegiatan Pusdiklat PB. Secara ringkas, berikut ini disajikan uraian dari tiap program dan kegiatan.

3.1.1. Akreditasi Lembaga

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat PB sudah mendapatkan status “terakreditasi” dari Lembaga Administrasi Negara. Hal ini memberi kewenangan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB untuk melaksanakan akreditasi pada lembaga/ instansi yang menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana di Indonesia.

Akreditasi lembaga pelatihan penanggulangan bencana bertujuan agar pelatihan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan di banyak wilayah dengan mutu yang terstandarisasi, sehingga mutu pelatihan yang diselenggarakan tetap berkualitas.

Sampai dengan bulan Desember 2021 dari target output 3 Lembaga Diklat tercapai 5 Output Akreditasi Lembaga Diklat



Gambar 9. Kegiatan untuk Program Akreditasi Lembaga hingga Desember 2021

Akreditasi Lembaga di Pusdiklat PB dilakukan secara online dan offline. Saat ini telah digunakan aplikasi SIAKANG untuk mendukung proses akreditasi. Berbagai dokumen yang diperlukan diunggah ke aplikasi tersebut untuk kemudian dapat diperiksa oleh penilai atau assessor dari Pusdiklat PB.

3.1.2. Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana

Dalam penyelenggaraan PB ada bermacam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaku PB (profesi PB), seperti pencarian dan pertolongan, koordinator hunian sementara, komandan pos komando tanggap darurat, pengelola logistik dan peralatan, pelaksana kajian pascabencana dan lain-lain. Agar profesi PB itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien

sesuai dengan tujuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/ 2007), maka para pelaku PB harus kompeten dan tersertifikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengakuan atas kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB BNPB memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sertifikasi dan uji kompetensi profesi bidang penanggulangan bencana.

Pedoman Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi ini dimaksudkan sebagai acuan unit kerja di lingkungan BNPB dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang penanggulangan bencana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat menyelenggarakan sertifikasi dan uji kompetensi secara efektif, efisien berdasarkan ketentuan yang ada.

Pedoman sertifikasi dan uji kompetensi profesi berisikan prinsip, persyaratan dan proses uji sertifikasi kompetensi yang mencakup mengajukan permohonan/pendaftaran, pra asesmen, asesmen, evaluasi hasil asesmen, keputusan pemberian sertifikat, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang. Sampai dengan Bulan Desember 2021, Pusdiklat PB dalam proses menyiapkan infrastruktur agar program Sertifikasi Penanggulangan Bencana dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dan aturan yang berlaku, antara lain:

- a. Penyusunan pedoman penyelenggaraan sertifikasi profesi bidang PB;
- b. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan BNSP; dan
- c. Re-Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi PB

Hal tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi sertifikasi dan uji kompetensi bidang PB yang menjadi salah satu fungsi pada Pusdiklat PB. Dalam penyiapan infrastruktur tersebut dibutuhkan waktu cukup lama karena dukungan anggaran dan SDM yang terbatas, pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi Covid-19, dan beberapa hal teknis lainnya.

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan sertifikasi dan uji kompetensi profesi di dalam Pedoman ini meliputi:

1.1 Proses Sertifikasi

Kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.

1.2 Skema Sertifikasi

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

1.3 Uji Kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian esesmen untuk mengukur kompetensi calon peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi

1.4 Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

1.5 Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.6 Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.

1.7 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8 Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Pelatihan Asesor Kompetensi adalah sebagai proses jaminan mutu dari LSP sehingga dapat menghasilkan asesor yang kompeten dalam melaksanakan asesmen terhadap tenaga kerja, peserta (siswa) pendidikan, pelatihan selama proses belajar setelah lulus atau perekrutan tenagakerja, penyaluran kinerja dalam rangka sertifikasi kompetensi. Serta untuk mempersiapkan dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam penanggulangan bencana. Sasaran penyelenggaraan Workshop Asesor Untuk melahirkan individu yang memiliki pengakuan berupa sertifikat asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas pemahaman tentang Asesor bidang Penanggulangan Bencana. Sasaran Workshop Asesor Penanggulangan Bencana adalah peserta mampu memahami Kebijakan Sistem Sertifikasi Kompetensi, Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen, Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen, Melaksanakan Asesmen, dan Mengases Kompetensi.

Kompetensi lulusan yang ingin dicapai dalam pendidikan dan pelatihan Workshop Asesor Penanggulangan Bencana ini adalah: peserta dapat memahami dan mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdaya saing dan memiliki standar global. Lokasi Pelatihan Workshop Asesor diselenggarakan di Hotel Orchardz, Jakarta.

3.1.3. Perencanaan, Koordinasi dan Monev Diklat PB

Guna mencapai tujuan Pusdiklat PB untuk meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana, maka diperlukan kegiatan pengelolaan pelatihan yang baik. Pengelolaan pelatihan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pelatihan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan.

Atas dasar tersebut, maka pada tahun 2021 diselenggarakan program perencanaan, koordinasi, operasional, monev diklat, dan pengelolaan pengetahuan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan di Pusdiklat PB dapat terlaksana dengan baik. Artinya apa yang dilakukan Pusdiklat dapat sesuai dengan kebutuhan BNPB dan masyarakat, serta sebagai salah satu upaya perbaikan, menjalin kerja sama, dan mengelola pengetahuan serta praktik baik dalam upaya penanggulangan bencana.

Sampai dengan bulan Desember 2021, program perencanaan, koordinasi, operasional, monev diklat, dan pengelolaan pengetahuan telah menghasilkan berbagai capaian, di antaranya:

a. Perencanaan dan Koordinasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat PB perlu bekerja sama dengan para mitra dan penerima manfaat layanan yang diberikan. Para mitra tersebut berasal dari unsur Pentaheliks, yaitu pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media, dan akademisi. Selain menjadi mitra kerja Pusdiklat, di kesempatan yang lain para mitra tersebut adalah penerima layanan Pusdiklat PB dalam bidang pelatihan penanggulangan bencana.

Guna mengetahui keinginan para mitra dan penerima manfaat serta memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Pusdiklat PB di tahun 2021, maka beragam kegiatan telah dilakukan, di antaranya:



Gambar 10. Beberapa Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan Pusdiklat PB di Triwulan IV tahun 2021

Rapat Koordinasi Teknis, dengan peserta BPSDM di seluruh Indonesia dan BPBD Provinsi Kab/Kota. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi program dan kegiatan Pusdiklat PB, terutama dalam program-program pelatihan beserta kurikulum yang ada di Pusdiklat kepada BPSDM dan BPBD di seluruh Indonesia.

Setelah itu, dengan para mitra dari Kementerian/Lembaga (TNI dan BPSDM Kemendagri), Perguruan Tinggi (Unjani, UNJ, UI), dan lembaga usaha (ADRA, Indonesia Power, XL Axiata, dan lainnya) dilakukan pula sosialisasi Perjanjian Kerja Sama pada 22 April 2021. Sosialisasi ini penting sebagai dasar kerja sama para pihak yang berasal dari unsur Pentaheliks dengan Pusdiklat PB agar diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Koordinasi yang tak kalah penting perlu juga dilakukan di internal Pusdiklat. Oleh karena itu, pada 29 Maret 2021 dilakukan rapat pembahasan pelaksanaan program dan anggaran Pusdiklat PB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mempercepat penyelenggaraan kegiatan dan penyerapan anggaran di Pusdiklat PB.

b. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi mengandung maksud untuk memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan pada unit Pusdiklat PB. Hal ini dilakukan guna melihat kesesuaian program dan pencapaian sasaran target yang direncanakan pada suatu periode waktu tertentu.

Adapun tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan informasi realisasi anggaran dan capaian kinerja yang terukur bagi unit Pusdiklat PB pada satu kurun waktu tertentu. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya perbaikan dan strategi yang berkesinambungan bagi Pusdiklat PB.

Sepanjang Triwulan IV tahun 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu:



Monitoring

dan



Evaluasi

2

Rapat Triwulan I (8 April 2021)

4

Evaluasi Pasca Diklat di Bali, Alumni DMB dari BPSDM Provinsi Bali dan EDRR Provinsi Bali (25 Juni 2021)

6

Evaluasi Pasca Diklat di Sumatera Utara, Alumni DMB dari BPSDM Sumatera Utara



Gambar 11. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Pusdiklat PB tahun 2021

Guna memastikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik, maka setiap bulan dilakukan rapat evaluasi bulanan. Dalam rapat ini, disampaikan berbagai capaian kinerja dan juga penyerapan anggaran di bulan sebelumnya. Khusus di bulan Januari, maka dilakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di tahun sebelumnya. Selain itu, di bulan April, Juli, Desember, dilakukan evaluasi triwulanan bersamaan dengan penyajian Laporan Evaluasi kegiatan sesuai yang diminta oleh Biro Perencanaan.

Selain melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran, pada Rapat Evaluasi Triwulan hadir pula narasumber dari berbagai pihak. Narasumber yang hadir di antaranya berasal dari Penjamin Mutu Pusdiklat PB dan penerima manfaat pelatihan, yaitu BPSDM dan BPBD. Pada Rapat Triwulan IV diselenggarakan di Jakarta secara offline dan menggunakan mekanisme talkshow.



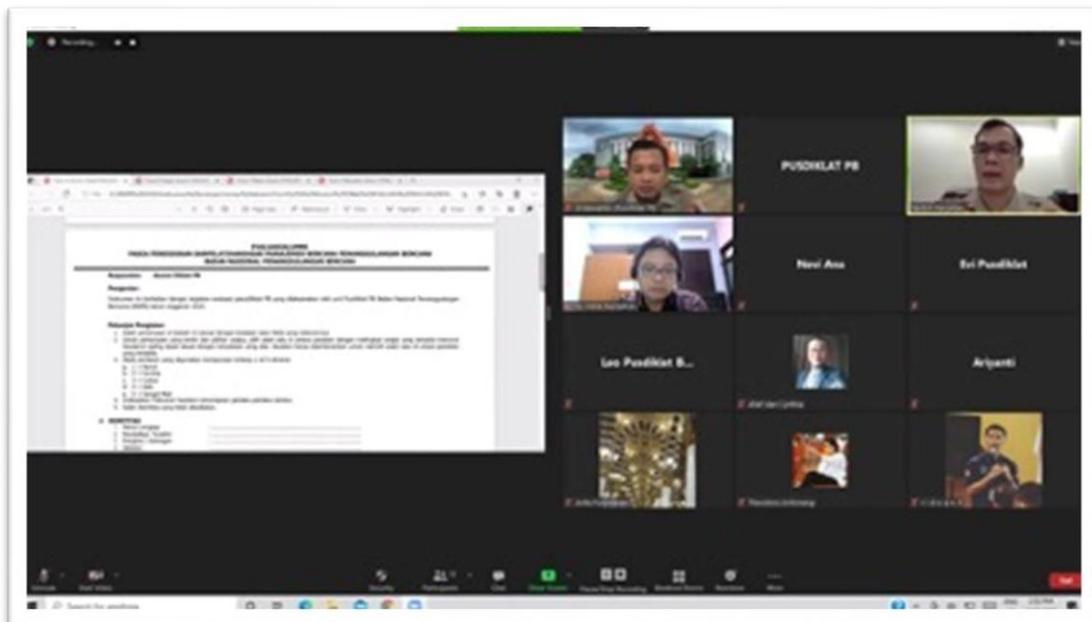
Gambar 12. Rapat Triwulan IV Diselenggarakan Secara Offline dengan Metode Talkshow dari Narasumber

Selain melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun berjalan, para evaluator di Pusdiklat PB juga turut serta dalam proses evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi untuk pelatihan ini dilakukan terhadap peserta, penyelenggara, dan narasumber. Khusus untuk peserta, evaluasi dilakukan terhadap sikap, keterampilan/penugasan, dan ujian akhir. Sementara untuk penyelenggara dievaluasi kecakapannya dalam menyelenggarakan pelatihan, termasuk kesiapan sarana dan

prasarana pelatihan. Narasumber pun juga dievaluasi untuk kemampuannya dalam memberikan materi kepada peserta.

Setelah evaluasi pelatihan, evaluator pun melakukan kegiatan evaluasi terhadap alumni Diklat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat dampak dari suatu pelatihan terhadap kinerja dan pengetahuan peserta setelah kembali ke instansi asal. Sesuai arahan dari Kepala Pusdiklat PB, maka tahun ini kegiatan evaluasi pascadiklat pada alumni mengalami sedikit perubahan terutama untuk instrument dan pihak yang terlibat dalam proses evaluasi.

Pada tahun 2021, evaluasi pascadiklat diarahkan untuk melibatkan akademisi dan menggunakan instrument evaluasi yang disiapkan oleh akademisi tersebut. Sebagai tindak lanjut arahan ini, maka dilakukan Rapat Persiapan Evaluasi Pascadiklat yang diikuti oleh evaluator di Pusdiklat PB dan akademisi dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Di dalamnya disampaikan instrumen dan proses evaluasi yang selama ini dilakukan di Pusdiklat PB untuk kemudian diberi masukan dan diupdate oleh akademisi. dan telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pasca diklat





Gambar 13. Evaluasi Pascadiklat Alumni

Kedua adalah evaluasi penyelenggaraan Diklat PB di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Proses evaluasi di sini meliputi penyelenggaraan diklat, kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, peserta, serta sarana prasarana Lemdiklat. Responden yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi alumni DMB Sumatera Utara, terdiri dari alumni dan pengelola pelatihan. Dari proses evaluasi, didapatkan bahwa

alumni Pelatihan Dasar Manajemen Bencana mengalami peningkatan dalam hal sikap dan perilaku, serta kinerja di instansi masing-masing.

Dari kegiatan ini juga perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu:

1. Penyusunan Bank Soal untuk Pre dan Post Test.
2. Inovasi dalam Mata Pelatihan tapi tetap mengacu pada Kurikulum DMB Pusdiklat PB.
3. Peningkatan sarana pembelajaran daring untuk mengakses pelatihan ke semua daerah di Sumatera Utara.
4. Menjadikan BPSDM sebagai klinik pengembangan SDM bidang Penanggulangan Bencana.
5. Menjadikan BPSDM sebagai mitra BPBD dalam melatih semua ASN dan Relawan Bencana di Sumatera Utara.
6. BPSDM Sumatera Utara menjadi corporate university di Sumatera Utara untuk mendukung pendidikan vokasi kebencanaan di Sumatera Utara.



Gambar 14. Proses Evaluasi Pascadiklat di Provinsi Sumatera Utara

Masih bagian dari proses pemantauan dan evaluasi serta untuk mendukung proses reformasi birokrasi di Pusdiklat PB, maka telah diselenggarakan Rapat Reviu Standar

Pelayanan Pusdiklat PB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 28 Desember 2021 di Jakarta dan melalui media zoom.

Pertemuan ini bertujuan untuk, pertama mendapatkan Standar Pelayanan Pusdiklat PB berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pelayanan (dalam hal ini Pusdiklat PB) dengan penerima layanan. Kedua mendapatkan output Berita Acara antara Penyelenggara Pelayanan (Pusdiklat PB) dengan penerima layanan. Ketiga melaksanakan Forum Konsultasi Publik melalui Reviu Standar Pelayanan Pusdiklat PB.

Dari pertemuan ini didapatkan hasil berupa masukan-masukan atas standar pelayanan di Pusdiklat PB antara lain untuk:

- a) Penyelenggaraan Diklat Teknis Penanggulangan Bencana;
- b) Akreditasi Diklat Teknis Penanggulangan Bencana; dan
- c) Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi.



Gambar 15. Pembukaan Rapat Reviu Standar Pelayanan Publik di Pusdiklat PB

c. Pengelolaan Pengetahuan

Pusdiklat PB memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana. Selain menyelenggarakan pelatihan, maka upaya lain yang dilakukan Pusdiklat PB adalah dengan melakukan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management.

Kegiatan ini dilakukan untuk merekam berbagai pembelajaran dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di Indonesia.

Sampai dengan bulan Desember 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung upaya mengelola pengetahuan, di antaranya:

 <p>Lokasi Pengungsian Korban Terancam Bansor Sumedang 2020 -6°57'11", 107°49'10", 738.7m 2021-01-12 12:46:29</p>	<p>Visitasi pascabencana tanah longsor di Cimanggu, Kabupaten Sumedang.</p>
 <p>"Penanganan Gempa Bumi di Sulawesi Barat dan Longsor di Sumedang"</p> <p>DARI SENTUL KITA SHARING</p> <p>Narasumber: Ujung Lasmanto, Ario Akbar Lomban, Abode</p> <p>Moderator: A.G Bayu Pradana</p> <p>Rabu, 24 Maret 2021 10.00 - 12.00 WIB</p>	<p>Webinar Dari Sentul Kita Sharing Jilid I: Penanganan Gempa Bumi di Sulawesi Barat dan Longsor di Sumedang</p>
	<p>Visitasi pascabencana gempa di Kabupaten Malang, Prov. Jawa Timur.</p>
 <p>PUSAT PENDIKSIAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA DARI SENTUL KITA SHARING JILID 2 PEMBELAJARAN PENANGANAN GEMPA BUMI DI JAWA TIMUR</p> <p>Panitia: ...</p> <p>Moderator: ...</p> <p>4 Mei 2021 10.00 - 12.00 WIB</p> <p>Info Lebih Lanjut: 0821 1705 5530</p>	<p>Webinar Dari Sentul Kita Sharing Jilid II: Pembelajaran Penanganan Gempa Bumi di Jawa Timur</p>

Gambar 16. Kegiatan yang Mendukung Upaya Mengelola Pengetahuan di Pusdiklat PB

Pengelolaan pengetahuan adalah serangkaian perekaman, pengemasan, dan penyampaian pengetahuan kepada masyarakat. Mengikuti alur ini, maka Pusdiklat PB BNPB melakukan kegiatan visitasi ke lapangan setelah terjadinya bencana untuk merekam upaya tanggap darurat secara langsung di lapangan.

Widyaiswara Pusdiklat PB melakukan kerja lapangan untuk merekam pengetahuan dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaku penanggulangan bencana di daerah. Sampai dengan bulan Desember 2021, sudah dilakukan dua kali visitasi ke lapangan, yaitu setelah terjadinya bencana tanah longsor di Cimanggu, Kab. Sumedang dan gempa di Malang, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 17. Perekaman Pengetahuan, Widyaiswara Pusdiklat PB Mewawancarai Personil BPBD Provinsi Jawa Timur

Setelah proses perekaman pengetahuan dilakukan, maka dilakukan pengemasan, dalam hal ini akan dibuat buku. Saat ini buku tersebut masih dalam proses penyusunan dari para penulis yang juga widyaiswara Pusdiklat PB dan telah melakukan visitasi ke lapangan.

Kemudian proses selanjutnya adalah membagikan pengetahuan kepada masyarakat melalui Webinar yang dinamakan 'Dari Sentul Kita Sharing'. Hingga bulan Desember 2021 telah dilaksanakan dua kali Webinar dengan tema:

1. Webinar Dari Sentul Kita Sharing Jilid I: Penanganan Gempa Bumi di Sulawesi Barat dan Longsor di Sumedang
2. Webinar Dari Sentul Kita Sharing Jilid II: Pembelajaran Penanganan Gempa Bumi di Jawa Timur

Sejauh ini dari pelaksanaan dua kali webinar secara daring tersebut telah diikuti oleh lebih dari 500 orang yang berasal dari BNPB, BPBD, para mitra Pusdiklat PB, dan masyarakat luas.

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

DARI SENTUL KITA SHARING JILID 2
**"PEMBELAJARAN PENANGANAN
GEMPA BUMI DI JAWA TIMUR"**

BNP B

Pembicara:

- Gatot Soebroto, SE, M.PSDM**, BPBD Jawa Timur
"Upaya Penanganan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur"
- Sadono Irawan, S.Sos**, BPBD Kab. Malang
"Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Malang"
- Bayu Pradana, M.Sc**, Widyaiswara Pusdiklat PB
"Penanganan Bencana di Jawa Timur dan Implikasinya terhadap Kebutuhan Pelatihan Penanggulangan Bencana"

Moderator:

- Jajat Suarjat, M.Si(han)**
Widyaiswara Pusdiklat PB

Ice Breaking
Abadie
Stand Up Comedian

4 Mei 2021
10.00 - 12.00 WIB

<http://bit.ly/sharingsentul2>
Meeting ID: 981 1584 2852
Passcode: sharing2

Info Lebih Lanjut :
0821 1195 9530

#pelatihanharusmendahuluibencana

pusdiklatbnpb PusdiklatBNPB pusdiklat.pb.bnpb www.etanggung.bnpb.go.id

Gambar 18. Flyer Kegiatan Webinar 'Dari Sentul Kita Sharing Jilid 2'

3.1.4. Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria

Dalam rangka melaksanakan fungsinya Pusdiklat PB BNPB memiliki tugas untuk menyusun norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) untuk menjalankan penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana. NSPK ini nantinya menjadi pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan terkait pelatihan bidang penanggulangan bencana. Selain itu, manfaat lain dari NSPK adalah untuk memperjelas mekanisme, mempermudah perencanaan program dan kegiatan, memperjelas pelaporan dan pendanaan, hingga memperjelas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan.

Pada tahun 2021, target penyusunan NSPK adalah 3 dokumen. Tiga target utama tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 19. Kegiatan NSPK di Pusdiklat PB pada Tahun 2021

Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 4 Tahun 2016 berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat. Namun, seiring dengan terbitnya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2016. Karena itu, pada tanggal 10 Mei 2021 telah

dilaksanakan Rapat Review Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2016. Saat ini proses review dan penyusunan Peraturan Badan untuk Pusdiklat PB masih terus berlangsung dan dilakukan bekerja sama dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, BNPB.

Selanjutnya sebagai bagian dari fungsi Pusdiklat PB untuk melakukan sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana, maka perlu disusun Pedoman Sertifikasi PB. Proses penyusunan pedoman ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang sudah terjadi dua kali pada 25 Maret 2021 dan 11 Mei 2021 di Jakarta. Saat ini dokumen Pedoman Sertifikasi PB masih terus berproses, karena pada saat yang sama juga harus mengacu pada Peraturan Badan mengenai Pusdiklat yang sedang disusun.



Gambar 20. Proses Penyusunan Pedoman Sertifikasi PB di Jakarta

Dokumen NSPK berikutnya yang disusun adalah review pada kurikulum rencana kontijensi, kurikulum kaji cepat bencana, dan kurikulum pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna). Untuk melakukan review ini, maka tiga kelompok kerja (pokja) telah dibentuk dan tiap pokja bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap tiap-tiap kurikulum. Saat ini tiga kurikulum telah direview dan telah memasuki tahap finalisasi.

Pada kegiatan ini, terdapat tambahan kegiatan dengan pendanaan bersumber dana dari pinjaman Bank Dunia melalui kegiatan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), saat ini masih tahap pengajuan Term of Reference (TOR) dan akan dilanjutkan dengan proses lelang dan selanjutnya mengerjakan program dan kegiatan.

3.1.5. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana

Layanan pelatihan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbarui wawasan kebencanaan dan menerapkannya dalam kegiatan. Pelatihan diselenggarakan dengan beberapa metode, seperti pemberian instruksi dan pengawasan bawahan serta transfer informasi. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan peserta, terutama dalam bidang - bidang yang berhubungan dengan teknis operasional, mampu memahami komponen dan esensi dasar.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan ini dimaksudkan agar SDM dapat berperan sebagai suatu potensi dinamis yang berperan penting dalam mencapai tujuan BNPB. Karena itu, penerima manfaat kegiatan ini adalah pegawai BNPB, BPBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Instansi/ Lembaga terkait, serta masyarakat yang terlibat.

Hingga bulan Desember tahun 2021, telah diselenggarakan serangkaian pelatihan bidang teknis penanggulangan bencana dengan informasi jumlah peserta, sebagai berikut:

32

Orang Peserta Diklat DMB
CPNS BNPB Angkatan 1

26

Orang Peserta Pelatihan
Perancang Simulasi

32

Orang Peserta Diklat DMB
CPNS BNPB Angkatan 2

34

Orang Peserta TOF
Perencanaan Kontigensi

28

Orang Peserta Diklat DMB
CPNS BNPB Angkatan 3

22

Orang Peserta SMT Bali

26

Orang Peserta Diklat TOF
AAR

56

Orang Peserta PRBBK
Sumatera Utara

30

Orang Peserta Diklat TOT
DMB

Angkatan 1 - DMB CPNS	5-Jan-21	9-Jan-21	32	CPNS
Angkatan 2 - DMB CPNS	5-Jan-21	9-Jan-21	32	CPNS
Angkatan 3 - DMB CPNS	5-Jan-21	9-Jan-21	27	CPNS
TOT RAR	8-Maj-21	13-Maj-21	26	CPNS
Pelatihan Penanganan Simulasi	23-Maj-21	3-Agt-21	26	CPNS
TOT DMB	23-Maj-21	2-Agt-21	38	CPNS
TOT Penanganan Kelelahan	24-Maj-21	31-Maj-21	34	CPNS
Release HKBP	4-Agt-21	5-Agt-21	37	CPNS
In House Training di Pasul	22-Agt-21	22-Agt-21	21	CPNS
Pelatihan Operator di Pasul	22-Agt-21	22-Agt-21	21	CPNS
DMB Makas (2 kelas)	28-Sep-21	24-Sep-21	57	CPNS
DMBP Bagan PDP (3 kelas Jaring/Mendak)	28-Sep-21	1-Okt-21	38	CPNS
Rebas di pasul	23-Mars-21	3-Apr-21	38	CPNS
TaT Jilapasa	6-Apr-21	18-Apr-21	38	CPNS
Pelatihan KB bagi Pegawai di Lingkungan Pasdiklat PB	15-Apr-21	17-Apr-21	47	CPNS

Gambar 21. Peserta dan Jenis Pelatihan Teknis Bidang PB di Triwulan IV, Tahun 2021

Dari Sembilan jenis pelatihan teknis penanggulangan bencana tersebut, maka jumlah total peserta adalah:

527 ORANG

Gambar 22. Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana

Secara lebih detail, jenis pelatihan, waktu penyelenggaraan, dan keterangan peserta pelatihan teknis bidang PB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Informasi Detail Pelatihan Teknis Bidang PB

No.	Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Diklat DMB CPNS BNPB Angkatan 1	5 - 9 Januari 2021	Online	32	Peserta CPNS gol III. Sebagai dasar dan orientasi kerja
2	Diklat DMB CPNS BNPB Angkatan 2	5 - 9 Januari 2021	Online	32	Peserta CPNS gol III. Sebagai dasar dan orientasi kerja
3	Diklat DMB CPNS BNPB Angkatan 3	5 - 9 Januari 2021	Online	27	Peserta CPNS gol II. Sebagai dasar dan orientasi kerja

4	Diklat TOF AAR	8 Maret - 13 Maret 2021	Online	26	Peserta (BPBD) calon petugas AAR simulasi di 6 daerah lokasi, dan BNPB
5	Diklat TOT DMB	29 Maret - 2 April 2021	Online	30	Peserta calon fasilitator pelatihan DMB, dan BNPB
6	Pelatihan Perancang Simulasi	29 Maret - 9 April 2021	Online	26	Peserta (BPBD) calon perancang simulasi di 6 daerah lokasi, dan BNPB
7	TOF Perencanaan Kontigensi	24 - 31 Mei 2021	Online	34	Peserta calon fasilitator pelatihan 13 daerah lokasi, dan BNPB
8	Relawan HKBP	4 Agustus 2021	Online	37	peserta dari lingkungan HKBP, pelatihan di pusat
9	In House Training di Pusat	22 Agustus 2021	Ina drtg sentul	21	es 1 es 2, tenaga ahli, pelatihan di pusat
10	DMB Unhan (2 kelas)	24 September 2021	Online	57	pelatihan mahasiswa dan pengajar di lingkungan Unhan, pelatihan di pusat
11	DMBPP Baguna PDIP (3 kelas daring/blended)	1 Oktober 2021	Jakarta	98	personil Baguna PDIP pusat dan daerah (output PN), pelatihan di daerah
12	Renkon di pusat	3 Desember 2021	Ina drtg sentul	30	pelatihan pejabat dan staf BPBD provinsi/kabupaten/kota , metode klasikal di Training Center Pusdiklat
13	ToT Jitupasna	10 Desember 2021	Ina drtg sentul	30	pelatihan pejabat dan staf BPBD provinsi/kabupaten/kota , metode klasikal di Training Center Pusdiklat
14	Pelatihan K3 bagi Pegawai di Lingkungan Pusdiklat PB	17 Desember 2021	Ina drtg sentul	47	pelatihan K3 bagi pegawai OB dan sekuriti Pusdiklat PB

Berikut ini salah satu dokumentasi kegiatan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Sumatera Utara.



Gambar 23. Salah Satu Sesi Diskusi di Pelatihan Risiko Bencana di Medan Sumatera Utara

Pada kegiatan ini, terdapat tambahan kegiatan dengan pendanaan bersumber dana dari pinjaman Bank Dunia melalui kegiatan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), saat ini masih tahap pengajuan Term of Reference (TOR) dan akan dilanjutkan dengan proses lelang dan selanjutnya mengerjakan program dan kegiatan. Dalam hal ini untuk pelatihan dana dari IDRIP masih belum terlaksana dan akan dilaksanakan di tahun 2023, dikarenakan proses lelang dan pengerjaan program dan kegiatan belum terlaksana.

3.1.6. Layanan Umum Pusdiklat PB

Kegiatan Layanan Umum Pusdiklat PB dimaksudkan sebagai dukungan pada kegiatan pengelolaan pelatihan. Secara lebih rinci, kegiatan ini terutama terkait ketatausahaan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan dimaksud dalam proses penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana. Sampai dengan bulan Desember atau Triwulan IV tahun 2021, Program Layanan Umum Pusdiklat PB telah melakukan berbagai hal, yaitu:

 <p>Pendidikan</p> <p>Mendukung pendidikan pegawai BNPB pada program split master degree (S2) di UGM dan Newcastle University berupa:</p> <p>biaya kuliah, biaya hidup, buku referensi, komunikasi, dan kursus Bahasa Inggris.</p>	 <p>Dukungan Pegawai</p> <p>Biaya komunikasi pegawai Pusdiklat PB.</p> <p>Biaya transportasi pegawai Pusdiklat PB.</p> <p>Biaya konsumsi (suplemen dan vitamin untuk imunitas) bagi pegawai Pusdiklat PB.</p>	 <p>Rapat</p> <p>Rapat PNBP dan Staf 0 Rupiah.</p> <p>Rapat Penyusunan Manajemen Kinerja.</p> <p>Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan, realisasi anggaran, dan laporan presensi.</p>	 <p>Pengadaan</p> <p>Pengadaan souvenir bagi tamu Pusdiklat dan peserta edukasi kebencanaan.</p> <p>ATK dan komputer supplies.</p>
--	---	---	--

Gambar 24. Kegiatan di Program Layanan Umum Pusdiklat PB



Gambar 25. Contoh Souvenir dari Pusdiklat PB untuk Tamu dan Peserta Edukasi Kebencanaan

Saat ini Pusdiklat PB memiliki satu program dukungan pendidikan kepada seorang pegawai BNPB yang sedang menempuh Split Degree Master Program untuk jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan di University of Newcastle Australia. Kepada personil tersebut diberikan dukungan berupa biaya kuliah, biaya hidup, biaya untuk pengadaan buku referensi, biaya komunikasi, dan biaya untuk kursus Bahasa Inggris.

Selanjutnya, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, maka banyak kegiatan di Pusdiklat PB yang diselenggarakan secara daring. Karena itu, maka diperlukan dukungan komunikasi dan makanan berupa suplemen dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Dukungan komunikasi diberikan berupa pulsa setiap bulan kepada pegawai Pusdiklat PB.

Dalam hal ini pelaksanaan Layanan Umum di Pusdiklat hanya terlaksana 1 Capaian Layanan umum Pusdiklat (051) dikarenakan di layanan Lokakarya Pusdiklat (052) tidak tercapai didalam tahun 2021 ini, di sebabkan peraturan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sedang dibuat belum selesai Finalisasinya, sehingga pusdiklat sendiri belum melaksanakan lokakarya yang keterkaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga untuk pelaksanaan Lokakarya Pusdiklat sendiri belum terlaksana.

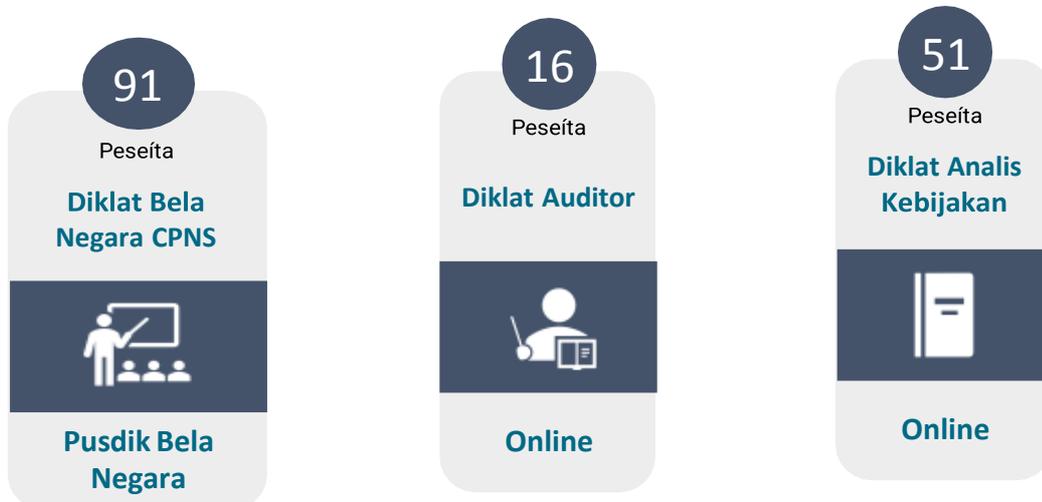
3.1.7. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

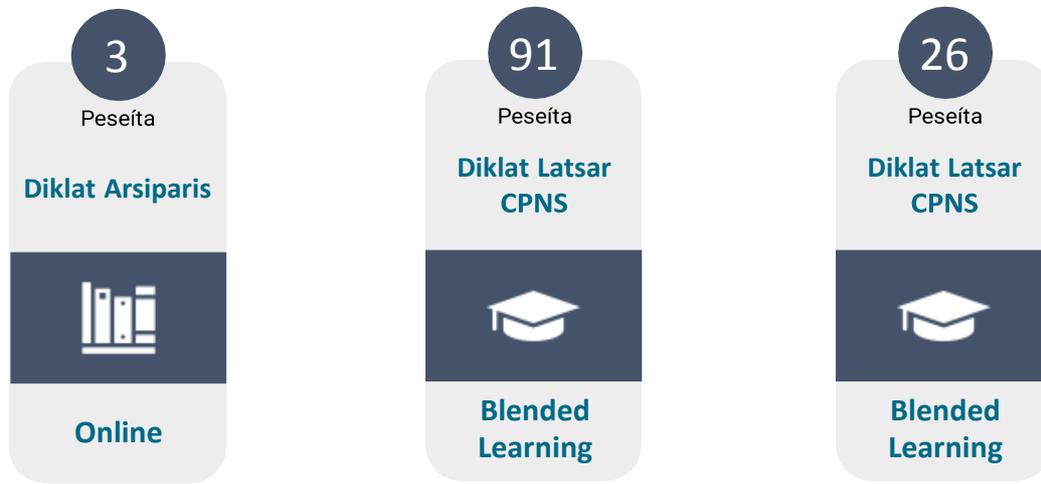
Program Pendidikan dan Pelatihan Internal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan BNPB. Peningkatan kapasitas terutama dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya, kemudian menerapkan pengetahuan yang didapat dalam pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, program ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka dalam bekerja. Diharapkan para personil memahami perannya sebagai komponen dan menjadi esensi dasar SDM, serta sebagai suatu potensi dinamis yang berperan penting dalam mencapai tujuan BNPB untuk mencapai ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Seiring arahan Presiden untuk perampingan organisasi yang dilakukan dengan perubahan dari pejabat struktural menjadi fungsional, kemudian sesuai dengan perubahan SOTK BNPB, maka pelatihan internal menjadi semakin penting perannya. Pelatihan internal sangat diperlukan oleh para pejabat fungsional yang baru saja dilantik agar semakin memahami tugas dan fungsinya yang baru.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2021, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal di Pusdiklat PB telah mendukung beberapa kegiatan pelatihan, yaitu:





Gambar 26. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal di Pusdiklat PB pada Triwulan IV tahun 2021

Dari enam pelatihan yang sudah diselenggarakan, maka jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan internal adalah sebanyak:

321 ORANG

Gambar 27. Jumlah Peserta yang Telah Mengikuti Pelatihan Internal

Peserta pelatihan internal tersebut berasal dari berbagai unit kerja yang ada di BNPB. Untuk Diklat Bela Negara dan Latsar bagi CPNS, maka diikuti oleh semua CPNS yang bergabung pada tahun 2021 di BNPB.



Gambar 28. Sosialisasi Latsar CPNS BNPB Tahun 2021

Sementara itu Diklat untuk jabatan fungsional analis kebijakan diikuti oleh para analis kebijakan di BNPB yang baru saja dilantik di penghujung tahun 2021. Diklat ini bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dan diselenggarakan secara daring (online).

Para Auditor sebanyak 16 orang berasal dari Inspektorat Utama, BNPB, menjadi penerima manfaat bagi Diklat Auditor. Sementara untuk Diklat Arsiparis, kegiatan ini diikuti oleh personil Tata Usaha dari Biro SDM dan Umum, dan juga adanya Pelatihan Non Teknis untuk Agen Perubahan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

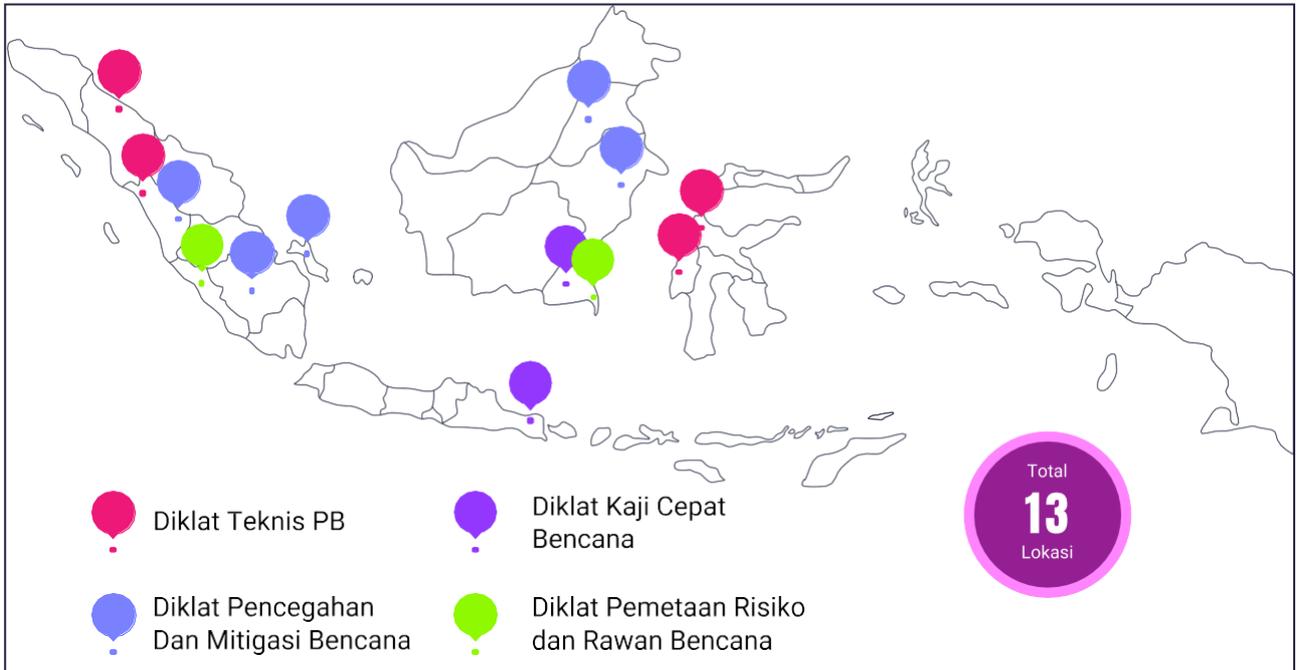
3.1.8. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana

Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman upaya penanggulangan bencana bagi Sumber daya manusia yang ada di daerah dan memiliki potensi bencana di Indonesia. Sedangkan Simulasi Penanggulangan Bencana lebih berfokus pada praktik untuk membangun sistem dan prosedur koordinasi dan komando antar pemangku kepentingan di daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Pendidikan dan Pelatihan serta Simulasi Penanggulangan Bencana ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kebencanaan, serta memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan pelatihan terutama dilakukan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan teknis operasional. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap risiko bencana di daerahnya diharapkan dapat meningkat. Kemudian karena kegiatan ini, maka pada akhirnya personil yang dilatih dapat mendukung penguatan kapasitas dalam membangun sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada tahun 2021 ini, terdapat 13 daerah yang akan menerima pelatihan teknis bidang penanggulangan bencana. Gambaran distribusi lokasinya sebagai berikut:



Gambar 29. Persebaran 13 Lokasi Diklat Teknis PB dan Diklat Lainnya

Secara detail, 13 lokasi dan jenis pelatihan di tiap lokasi dapat dilihat di Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Nama Provinsi dan Jenis Diklat yang Diselenggarakan Pusdiklat PB Tahun 2021

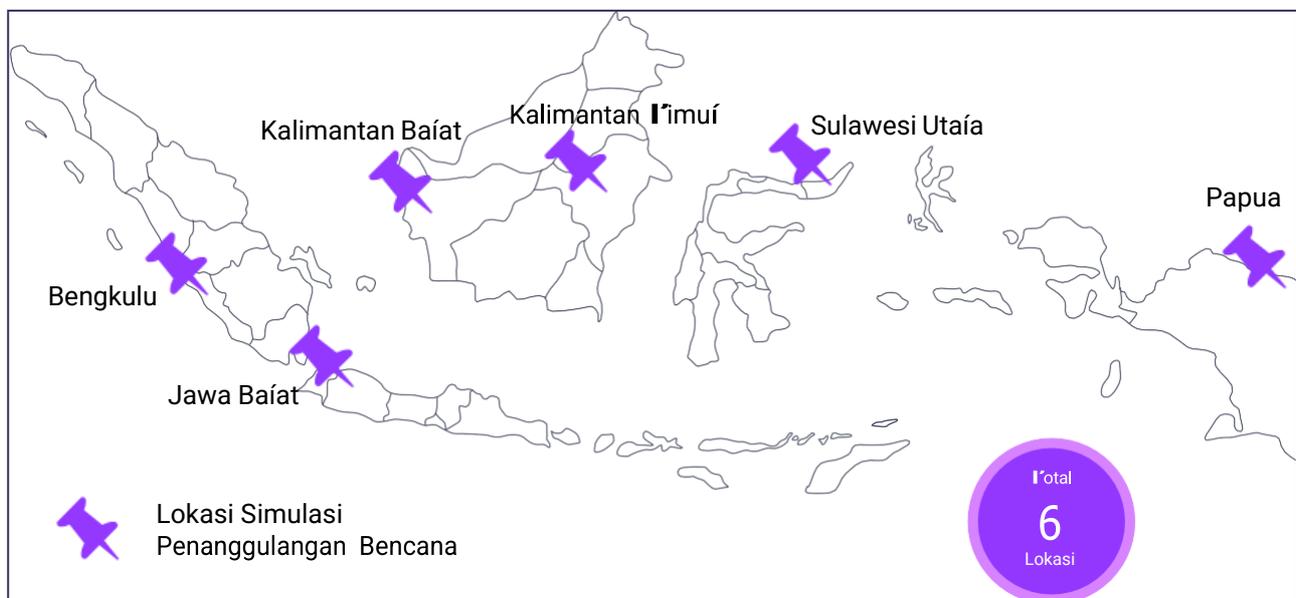
No.	Provinsi	Nama Pelatihan
1	Sumatera Selatan	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Sumatera Selatan, pelatihan di daerah
2	Aceh	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Aceh, pelatihan di daerah
3	Bengkulu	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Bengkulu, pelatihan di daerah
4	Kalimantan Utara	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Kalimantan Utara, pelatihan di daerah
5	Kep. Riau	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Kep.Riau, pelatihan di daerah
6	Sulawesi Tengah	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Sulawesi Tengah, pelatihan di daerah
7	Sulawesi Tenggara	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Sulawesi Tenggara, pelatihan di daerah
8	Sumatera Barat	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Sumatera Barat, pelatihan di daerah
9	Jawa Timur	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Jawa Timur, pelatihan di daerah
10	Kalimantan Selatan	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Kalimantan Selatan, pelatihan di daerah
11	Kalimantan Timur	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Kalimantan Timur, pelatihan di daerah
12	Sumatera Utara	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di

		lingkungan Pemda Sumatera Utara, pelatihan di daerah
13	Sulawesi Barat	pelatihan perangkat daerah dan lembaga PB di lingkungan Pemda Sulawesi Barat, pelatihan di daerah

Kegiatan Diklat Teknis Penanggulangan Bencana dilaksanakan selama 5 hari atau sebanyak 40 jamlat. Kegiatan Diklat Teknis Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan pada Hotel terpilih dengan melibatkan panitia daerah dari BPBD dan BPSDM serta dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini didahului dengan 1 kali rapat persiapan pada setiap kegiatan diklat yang akan dilaksanakan.

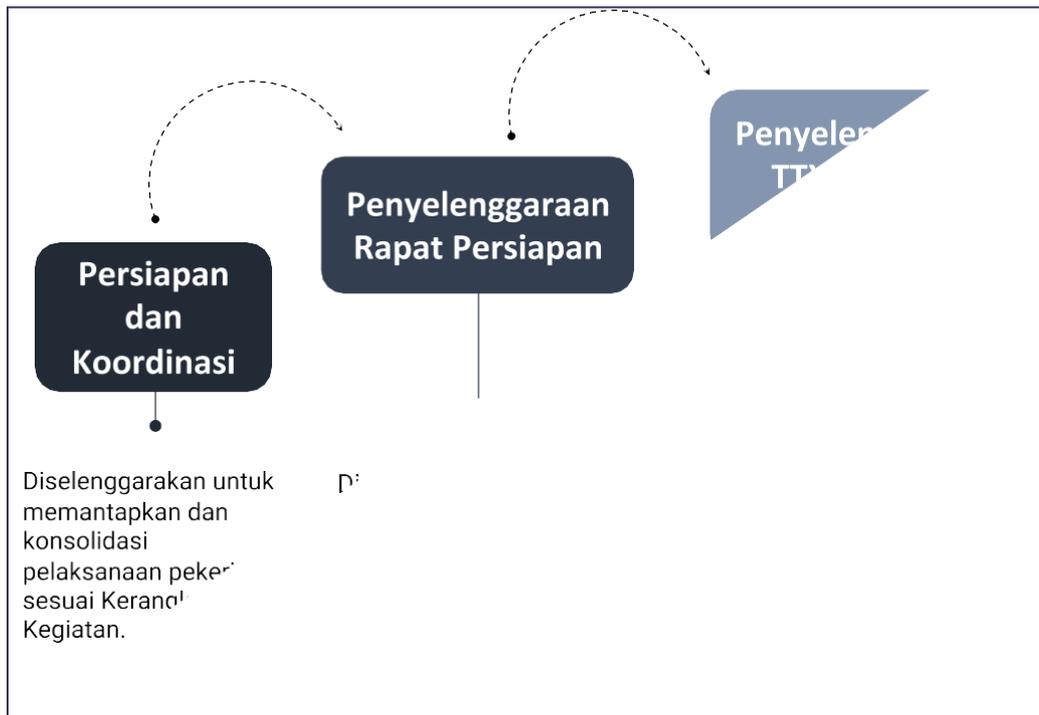
Sampai dengan bulan Desember tahun 2021, Diklat Teknis Penanggulangan Bencana belum diselenggarakan di daerah, karena berbagai alasan.

Kemudian untuk penerima kegiatan simulasi penanggulangan bencana diselenggarakan di 6 daerah. Gambaran distribusi lokasinya sebagai berikut:



Gambar 30. Sebaran Provinsi Penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Bencana

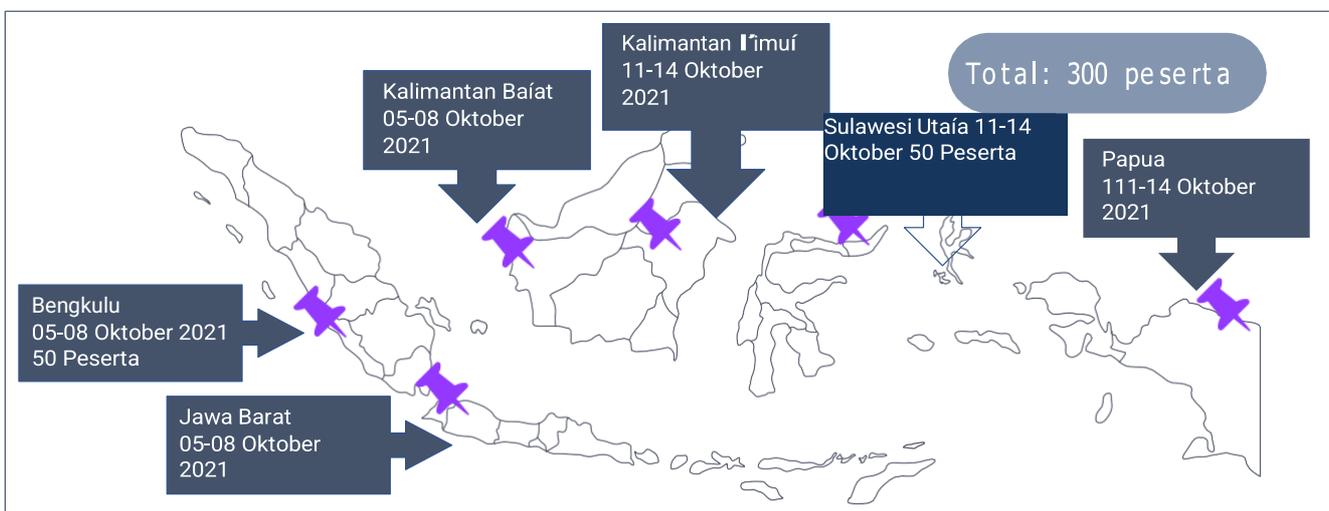
Terdapat beberapa tahapan dalam menyelenggarakan kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 31. Tahapan dalam Menyelenggarakan Simulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota

Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah diselenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah kegiatan rapat persiapan simulasi di Jakarta. Kemudian dilakukan survei lapangan di lokasi-lokasi yang akan melakukan simulasi.

Setelah itu, telah dilaksanakan pula Rapat Perancangan Simulasi di lima lokasi. Berikut ini lokasi yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut:



Gambar 32. Lokasi yang Telah Menyelenggarakan Kegiatan Perancang Simulasi

Jadwal selanjutnya akan dilakukan kegiatan simulasi di Papua dan Kalimantan Timur, tetapi dibatalkan, karena pandemic dan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali.



Gambar 33. Kegiatan Simulasi di Papua

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Memberikan gambaran tentang rencana penyelenggaraan *Table Top Exercise (TTX)* dan *Command Post Exercise (CPX)* di Provinsi Papua dan sekitarnya serta memberikan arahan dan kebijakan terkait penyelenggaraan simulasi.

Tujuan kegiatan simulasi penanggulangan bencana banjir dan longsor pada masa pandemi covid-19 di Papua Tahun 2021 adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana khususnya geladi ruang/ *Table Top Exercise (TTX)* dan geladi posko/ *Command Post Exercise (CPX)*
- b. Membangun sistem dan prosedur koordinasi dan komando yang lebih baik antar stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam komando tanggap darurat bencana.
- d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dan atau *Standar Operation Procedure (SOP)* tanggap darurat bencana di daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, kami melihat terdapat dua tujuan utama dari pelaksanaan simulasi yang diselenggarakan di Provinsi Papua, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap resiko bencana di Provinsi Papua dan membangun sistem kesiapsiagaan bencana (manajemen resiko bencana) yang dapat diterapkan dalam keadaan bencana. Kedua tujuan utama ini dengan demikian melibatkan unsur masyarakat, pemerintah

daerah, dan instansi terkait lainnya.

3.1.9. Kegiatan Pendukung

a. Pusklat dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana

Setiap tanggal 26 April, BNPB menyelenggarakan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pusklat pun tak ketinggalan untuk menyukseskan kegiatan ini. Kegiatan yang diselenggarakan adalah latihan evakuasi di kantor Pusklat PB, Kompleks InaDRTG, Sentul Bogor.

Selain di kantor, Pusklat PB juga melakukan upaya kesiapsiagaan terhadap masyarakat di sekitar kantor Pusklat PB. Pada tahun 2021 ini, dua lokasi dipilih untuk pelaksanaan kegiatan, yaitu di SDN 04 Hambalang, Sentul, Bogor dan di Balai Desa Tangkil, Sentul, Bogor. Di sini masyarakat di Desa Tangkil dan guru serta siswa di SDN 04 Hambalang menerima berbagai informasi kebencanaan, termasuk melakukan simulasi evakuasi mandiri.



Gambar 34. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di SDN 04 Hambalang

b. Pelatihan Mandiri oleh Daerah

Kendati tugas dan fungsi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana berada di pundak Pusklat PB, tetapi pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota tak ketinggalan terlibat aktif dalam upaya ini. Selain dari

pemerintah daerah, upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan juga dilakukan oleh lembaga usaha.

Hingga bulan Desember tahun 2021, berikut ini beberapa pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha:

Tabel 6. Pelatihan Mandiri yang Diselenggarakan oleh Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Usaha

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
1	Dasar Manajemen Bencana	Islamic Relief bekerjasama dengan BPBD SIGI	40
2	Dasar Manajemen Bencana	BPSDM Kalsel	40
3	Diklat Penanggulangan Bencana Alam	KODIKLAT TNI	30
4	Pelatihan Teknis TRC	BPSDM Jateng	30
5	Dasar Manajemen Bencana	BPBD SUMUT	40
6	Dasar Manajemen Bencana	BPBD JABAR	30
7	Dasar Manajemen Bencana	BPBD SUMBAR	40
8	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Hitung Cepat Pascabencana	Kab. Agam, Sumbar	40
9	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)	Prov. Sumatera Selatan	40
10	Dasar Manajemen Bencana	Prov. DIY	35
11	Dasar Manajemen Bencana	Siap Siaga dan BPBD Prov. Bali	60
12	Dasar Manajemen Bencana	Indonesia Power	30
13	Dasar Manajemen Bencana	BRI	35

Pada pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh daerah dan lembaga usaha, Pusdiklat PB mendukung dalam hal pengiriman widyaiswara sebagai pemateri atau narasumber. Hingga bulan Desember, maka jumlah peserta dari pelatihan mandiri yang sudah diselenggarakan adalah:

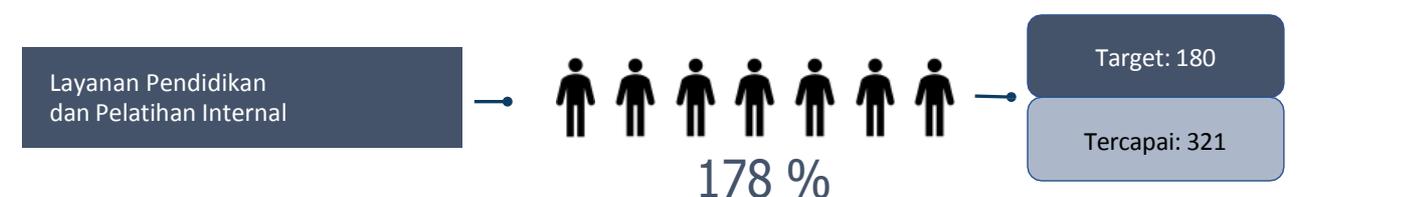


Gambar 35. Jumlah Peserta dari Pelatihan Mandiri oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Usaha

3.2. Analisis Kegiatan (Keberhasilan dan Tantangan)

Pusdiklat PB sepanjang Triwulan IV tahun 2021 telah mencapai berbagai keberhasilan. Namun, di sisi lain berbagai dinamika yang terjadi di internal dan eksternal Pusdiklat PB, termasuk di BNPB sebagai lembaga induk, turut memengaruhi keberhasilan tersebut. Berbagai kondisi tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Pusdiklat PB dalam menyelenggarakan program dan kegiatannya.

Keberhasilan Pusdiklat di antaranya adalah tercapainya Capaian Output Prioritas Nasional, dalam hal ini melebihi Target capaian Output dalam menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia, terutama di internal BNPB. Dalam kegiatan pelatihan internal BNPB, dari target sebanyak 180 orang, telah tercapai 321 orang. Berikut ilustrasi keberhasilan dari kegiatan ini:

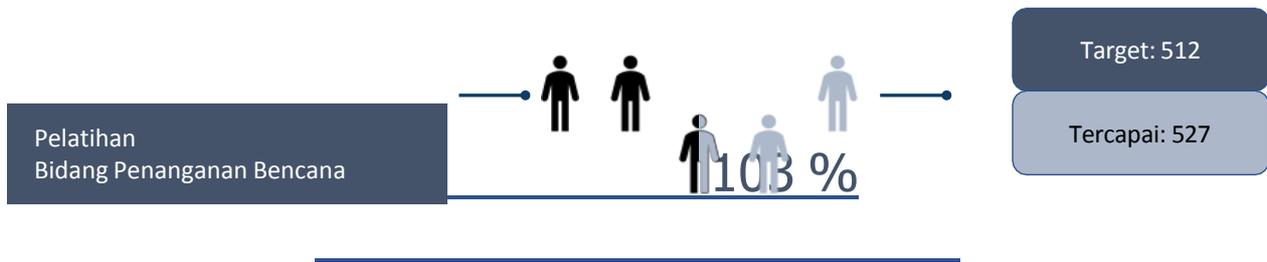


Gambar 36. Capaian Kegiatan Pelatihan Internal di BNPB

Kegiatan pelatihan internal dapat melebihi target yang dicanangkan hingga 140% dikarenakan beberapa sebab. Pertama, peserta pelatihan ini berasal dari internal BNPB sehingga memudahkan koordinasi. Kedua, pelatihan internal sangat dibutuhkan oleh para penerima manfaat, yaitu CPNS dan juga pejabat fungsional tertentu yang baru saja dilantik di BNPB. Ketiga, metode pelatihan untuk internal ini dapat diselenggarakan secara daring, sehingga tidak terpengaruh oleh situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Di samping keberhasilan, Pusdiklat PB juga memiliki beberapa tantangan untuk mencapai

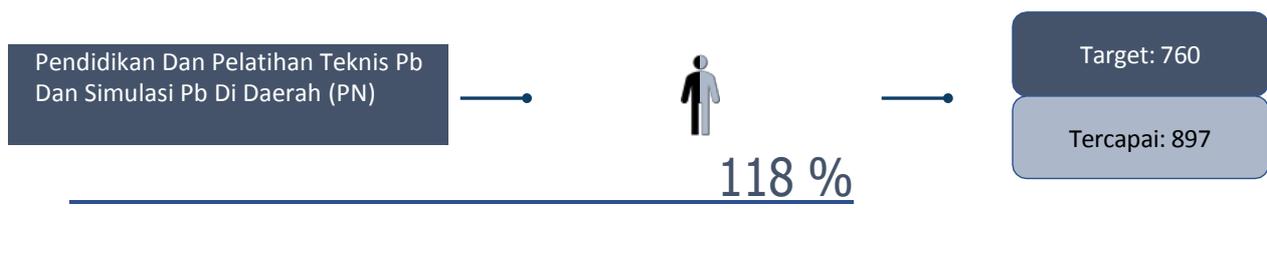
target kinerjanya. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pelatihan teknis PB di pusat, dari target yang dicanangkan baru tercapai 56%. Berikut ini ilustrasi capaian kegiatan pelatihan bidang penanggulangan bencana di pusat:



Gambar 37. Capaian Kegiatan Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana di Pusat:

Selanjutnya tantangan paling besar terjadi pada kegiatan pelatihan teknis penanggulangan bencana di Pusat. Program ini memerlukan kegiatan perjalanan dinas ke daerah untuk melakukan persiapan berupa survei dan koordinasi, perencanaan dan perancang kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Semua kegiatan tersebut belum bisa dilakukan karena situasi di Indonesia dan dunia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan terkait yang tidak memungkinkan dilakukannya perjalanan ke luar dari Jakarta.

Berikut ini ilustrasi capaian program Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pb Dan Simulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah hingga bulan Desember tahun 2021.



Gambar 38. Capaian Program Pelatihan Bidang Penanganan Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana

Selain kegiatan pelatihan, tantangan juga dihadapi untuk program dan kegiatan Pusdiklat PB lainnya. Di antara kegiatan tersebut adalah akreditasi Lembaga Yang Sudah Capaian Outputnya sudah terlaksana, dengan Target Output 3 Lembaga diklat Tercapai 5 Akreditasi Lembaga Diklat, lalu koordinasi dan monev yang sudah Capaian Outputnya sudah terlaksana dengan Target Output 5 Kegiatan sudah tercapai 5 kegiatan, sertifikasi kompetensi yang target outputnya 60 orang hanya tercapai 30 orang dikarenakan dalam proses pelaksanaan kegiatan adanya factor penerimaan negara bukan pajak yang belum bisa dilakukan sehingga mengurangi capaian target output sebanyak 30 orang. Penyusunan NSPK telah tercapai sebanyak 5 NSPK Diklat, dengan total NSPK 9, dimana sisa NSPK yang belum tercapai adalah dokumen Kesiapsiagaan IDRIP yang masih dalam proses pengerjaan

dan akan diselesaikan ditahun 2023, dan layanan umum Pusdiklat PB yang hanya bisa tercapai 1 layanan diklat dikarenakan 1 layanan lagi menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum bisa dilakukan karena untuk peraturannya sendiri belum difinalisasi. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatan ini adalah:

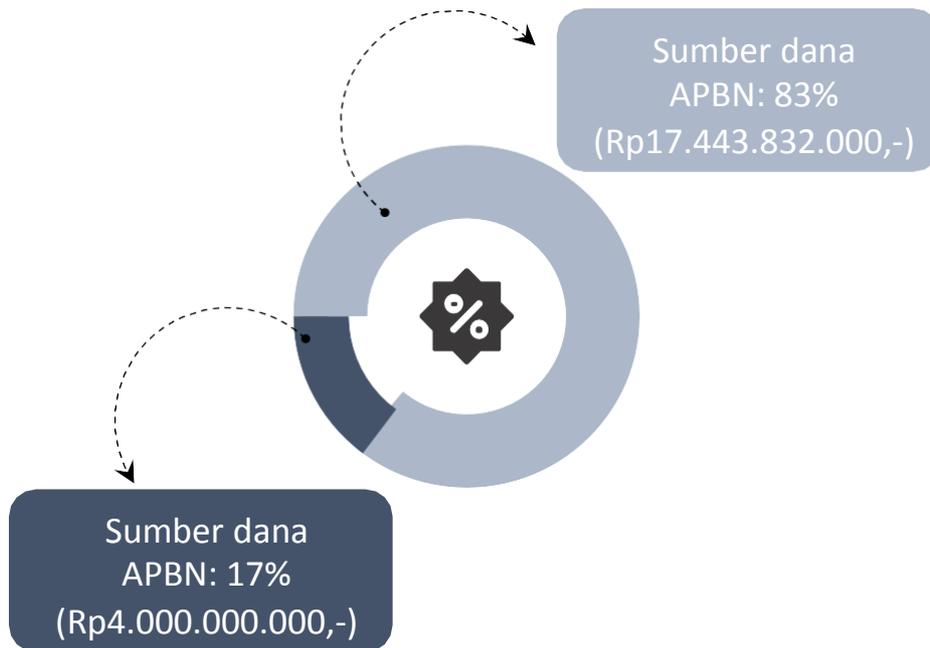
1. Target output tahun 2021 memerlukan peran dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, para widyaiswara, pejabat struktural, serta unsur lainnya yang juga memiliki kesibukan lain. Akibat kondisi ini dan jika menginginkan masukan dari semua pihak, maka pelaksanaan beberapa pertemuan terkendala. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan secara online.
2. Pembatasan pertemuan fisik dan larangan berkerumun juga menjadi tantangan untuk melakukan rapat atau pertemuan yang memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi yang lebih intensif. Antisipasi yang dilakukan oleh Pusdiklat PB adalah melakukan pertemuan dengan protokol kesehatan yang ketat, dilaksanakan tes swab bagi peserta pertemuan, dan tetap memfasilitasi pertemuan secara online.
3. Terjadi perubahan struktur organisasi di Pusdiklat PB yang membutuhkan penyesuaian, terutama dalam memahami mekanisme koordinasi, tugas, dan fungsi masing-masing personil dalam mendukung pencapaian target Pusdiklat PB.
4. Pada masa pandemi, ada pemberlakuan kebijakan WFH yang juga berlaku di Pusdiklat PB. Kondisi ini menyebabkan tantangan pada pola komunikasi, pemantauan, dan koordinasi antar personil di Pusdiklat PB. Kondisi ini juga membutuhkan penyesuaian dari semua pihak, sehingga berimbas pada upaya pencapaian target dan kegiatan di Pusdiklat PB. Solusi yang dilakukan oleh Pusdiklat PB adalah dengan memaksimalkan pertemuan secara daring serta memberikan dukungan biaya komunikasi kepada personil.
5. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dana dari pinjaman the World Bank melalui kegiatan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), saat ini masih tahap pengajuan Term of Reference (TOR) kegiatan pelatihan kesiapsiagaan dan penyusunan NSPK.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban dari setiap penggunaan anggaran yang tersedia, termasuk di Pusdiklat PB. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan di Pusdiklat PB.

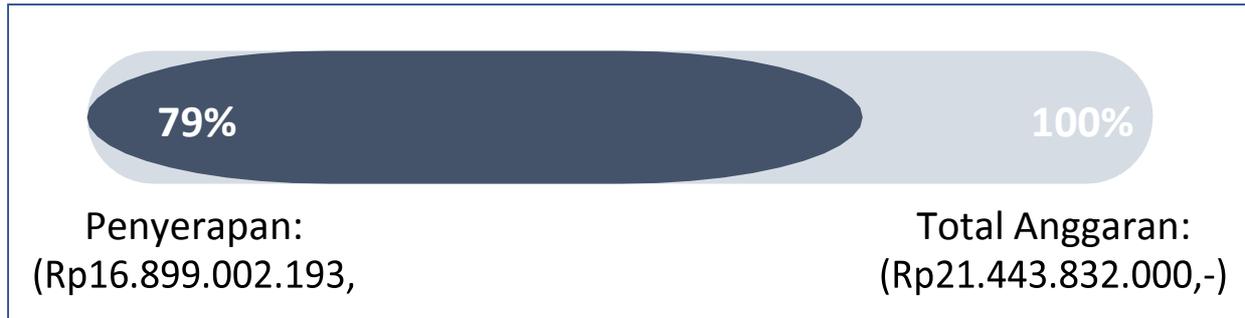
Pada tahun 2021, Pusdiklat PB harus mengelola anggaran sejumlah RP21.443.832.000,-. Dari angka tersebut, maka sebanyak Rp17.443.832.000,- berasal dari APBN. Sementara Rp4.000.000.000,- berasal dari pinjaman Bank Dunia dan menjadi bagian dari proyek IDRIP.

Perbandingan antara dana yang bersumber dari APBN dan pinjaman yang harus dikelola oleh Pusdiklat PB di tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 39. Perbandingan Sumber Dana dari APBN dan IDRIP

Dari anggaran sebesar Rp21.443.832.000,-, hingga bulan Desember tahun 2021 telah terserap sebesar: Rp16.899.002.193,-. Artinya, selama Triwulan IV tahun 2021, telah terserap anggaran sebesar 79%. Ilustrasi penyerapan anggaran di Pusdiklat PB pada Triwulan IV tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Gambar 40. Penyerapan Anggaran di Pusdiklat PB pada Triwulan IV Tahun 2021

Apabila dilihat secara detail per kegiatan, maka penyerapan tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Detail Penyerapan Kegiatan dan Persentasenya di Tiap Kegiatan

No.	Unit/Program/Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Akreditasi Lembaga	3 Lembaga Diklat	719.760.000	707.781.140	98,34%
2.	Sertifikasi Profesi SDM	60 Orang	405.700.000	260.645.000	64,25%
3.	Perencanaan, Koordinasi dan Monev Diklat PB	5 Kegiatan	1.942.655.000	1.914.179.467	98,53%
4.	Norma Standard Prosedure dan Kriteria	9 Dokumen	4.159.875.000	1.147.675.200	27,59%
5.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	512 Orang	2.386.755.000	1.187.618.000	86%
6.	Layanan Umum	2 Layanan	1.181.206.000	1.066.605.100	90,30%
7.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	180 Orang	1.756.061.000	1.744.793.260	99,36%
8.	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 Orang	8.891.820.000	8.869.705.026	99,75%
Total			21.443.832.000	16.899.002.193	79%

Tabel 7 menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang menunjukkan penyerapan paling sedikit secara persentase adalah Norma Standard Prosedure dan Kriteria dengan angka 27,59 persen. dikarenakan sisa anggaran untuk NSPK Dokumen Kesiapsiagaan IDRIP belum di gubakan, Di sisi lain,

program dan kegiatan yang paling banyak menyerap anggaran secara persentase adalah Pelatihan Bidang Penanganan Bencana sebesar 99,75%.

BAB IV. PENUTUP

Pada Triwulan IV (empat) atau antara periode bulan Januari hingga Desember tahun 2021, Pusdiklat PB telah banyak melakukan program dan kegiatan. Semua itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusdiklat PB dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Selanjutnya, tugas dan fungsi tersebut dibagi ke dalam beberapa program dan kegiatan, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Semua ini kemudian menjadi penetapan atau perjanjian kinerja bagi Kepala Pusdiklat PB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai target kinerjanya, Pusdiklat PB tidak terlepas dari berbagai kebijakan, kondisi, dan fenomena yang terjadi. Kondisi tersebut contohnya adalah situasi pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan yang terkait pandemi tersebut. Semua fenomena ini kemudian akan memengaruhi kinerja Pusdiklat PB serta proses penyerapan anggarannya. Akibat dari berbagai kondisi dan kebijakan tersebut, maka Pusdiklat PB telah menghasilkan berbagai capaian kinerja. Namun, Pusdiklat PB tak boleh melupakan tantangan yang harus dihadapi di paruh kedua tahun 2021. Selanjutnya diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara personil di internal Pusdiklat PB, antara Pusdiklat PB dengan unit kerja lain di BNPB, dan antara Pusdiklat PB dengan para mitra dari unsur pentaheliks.

Akhirnya, untuk Capaian Output Pusdiklat bisa dikatakan Tercapai, untuk anggaran bisa dikatakan sudah terserap dengan besaran 79%.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

Formulir Perjanjian Kinerja

Tingkat Unit Eselon I, dan II

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
01	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Jumlah Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan Teknis PB yang telah diakreditasi	3 Lembaga
		Jumlah SDM yang disertifikasi	60 Orang
		Jumlah kegiatan koordinasi Pendidikan dan Pelatihan PB	5 Kegiatan
		Jumlah dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 Dokumen
		Jumlah SDM dilatih pada Bidang Penanganan Bencana	512 Orang
		Jumlah kegiatan layanan umum di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB	2 Layanan
		Jumlah SDM Pendidikan dan pelatihan Layanan Non teknis Internal	180 Orang
		Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 Orang

Program	Anggaran
1. Akreditasi Lembaga	Rp 719.760.000,00
2. Sertifikasi Profesi dan SDM	Rp 405.700.000,00
3. Koordinasi	Rp 2.091.365.000,00
4. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Rp 4.011.165.000,00
5. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	Rp 2.386.755.000,00
6. Layanan Umum	Rp 1.181.206.000,00
7. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Rp 1.756.061.000,00
8. Pelatihan Bidang Penanganan Bencana (PN	Rp 8.891.820.000,00
TOTAL	Rp 21.443.832.000,00

2. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

No	Sasaran Kinerja/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target												Unit Penanggung jawab	Ket	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Jumlah Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan Teknis PB yang telah diakreditasi	3 Lembaga									3 Lemdik					Bidang Program dan Evaluasi	Aryanti
		Jumlah SDM yang disertifikasi	60 Orang							30 Org					30 Org		Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Catur Sudiro
		Jumlah kegiatan koordinasi Pendidikan dan Pelatihan PB	5 Kegiatan			1 Keg	1 Keg			1 Keg			1 Keg			1 Keg	Bidang Program dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aryanti • Sri Dewanto

No	Sasaran Kinerja/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target												Unit Penanggung jawab	Ket		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
		Jumlah dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 Dokumen							1 Dok				1 Dok		1 Dok	6 Dok	Bidang Program dan Evaluasi	Aryanti
		Jumlah SDM dilatih pada Bidang Penanganan Bencana	512 Orang							300 Org				212 Org				Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Anita Puspitasari Wahyu Indriyadi
		Jumlah kegiatan layanan umum di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB	2 Layanan							1 Lyn							1 Lyn	Tata Usaha	Rija Ramdhani
		Jumlah SDM Pendidikan dan pelatihan Layanan Non teknis Internal	180 Orang		92 Org	52 Org				92 Org				40 Org		5 Org		Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Anita Puspitasari Rija Ramdhani

No	Sasaran Kinerja/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target												Unit Penanggung jawab	Ket	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760 Orang	92 Org	30 Org	30 Org							203 Org	203 Org	202 Org		Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Wahyu Indriyadi